

PRAKTIK POLITIK DUMPING TIONGKOK DI INDONESIA

TAHUN 2021-2022

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

BAYU PERMANA

19323052

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

PRAKTIK POLITIK DUMPING TIONGKOK DI INDONESIA TAHUN

2021-2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

BAYU PERMANA

19323052

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Praktik Politik Dumping Tiongkok di Indonesia Tahun 2021-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional




Pada Tanggal
20 Juni 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan



3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 29 Mei 2023



Bayu Permana

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia Nya kepada penulis penelitian ini sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sebagai bentuk ungkapan dari rasa syukur atas pencapaian sejauh ini yang telah berhasil dilewati, saya selaku penulis penelitian ini banyak mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan halaman ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Ibu Ilyanita dan Bapak Suradi, beserta adik saya Syaza Azzahra Ramadhani berkat doa, upaya, kerja keras dan dukungan dari mereka, peneliti berhasil menempuh perkuliahan dan menyelesaikannya.
2. Kepada DSD yang selalu menemani peneliti berproses setiap harinya.
3. Kepada dosen pembimbing skripsi, Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., MA. yang telah membimbing peneliti selama proses penulisan skripsi.

DAFTAR ISI

PRAKTIK POLITIK DUMPING TIONGKOK DI INDONESIA TAHUN 2021-2022	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	16
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	16
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	17
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	17
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	17
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
2.1. <i>Promoting Nationalism and Patriotism</i>	19
2.2. <i>Technologicalism</i>	23
2.3. <i>Population Policy for a Strong Nation</i>	28
BAB III	32
3.1. <i>Bullionism and Hard Currency Accumulaion</i>	32
3.2 <i>Maintaining a Favorable Balance of Trade</i>	37
3.3 <i>Strategic Global Expansion</i>	42
Tabel 1. Analisis Neo-Merkantilisme dalam Praktik Dumping Tiongkok di Indonesia Tahun 2021-2022	48

BAB IV	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2 Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Tabel 1. Aplikasi Neo-Merkantilisme terhadap Dumping Tiongkok tahun 2021-2022.....	48
--	----

DAFTAR SINGKATAN

WTO	: World Trade Organization
KADI	: Komite Anti Dumping Indonesia
BMAD	: Bea Masuk Anti Dumping
BOPET	: <i>Biaxially Oriented Polyethlenen Terephthalate</i>
HRC Alloy	: <i>Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel</i>
PSF	: <i>Polyester Staple Fiber</i>
MT	: Metrik Ton
BRI	: <i>Belt and Road Initaitve</i>
AIIB	: <i>The Asian Infrastructure Investment Bank</i>
CCP	: <i>Chinese Communist Party's</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
SDR	: <i>Special Drawing Rights</i>
TRQs	: <i>Tariff Rate Quotas</i>
AS	: Amerika Serikat
REER	: <i>Real Effective Exchange Rate</i>
PBOC	: <i>People's Bank of China</i>

ABSTRAK

Kegiatan ekspor dan impor berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat bagi sebuah negara. Dalam pelaksanaannya, persaingan antar negara tidak dapat dihindari. Hal tersebut memicu terjadinya tindakan ilegal dengan menjual produk di luar negeri lebih rendah dibandingkan dengan harga jual di negara asalnya atau yang biasa disebut dengan dumping. Tiongkok terlibat dalam 10 kasus dumping di Indonesia pada tahun 2021-2022 dan 4 kasus diantaranya dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Tiongkok melakukan politik dumping di Indonesia guna memperkuat kekuasaan dan pengaruh pada lingkup internasional serta meningkatkan perekonomian negara yang menyebabkan banyak kerugian bagi Indonesia. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teori neo-merkantilisme yang ditulis oleh Fu-Lai Tony Yu guna menganalisis alasan Tiongkok melakukan praktik politik dumping di Indonesia tahun 2021-2022 dan dampaknya bagi Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, Tiongkok melakukan dumping di Indonesia untuk memperkuat perekonomian, kekuasaan, serta pengaruh terhadap dunia internasional. Akibat dumping yang dilakukan Tiongkok pihak Indonesia mengalami sejumlah kerugian pada sektor industri dalam negeri seperti penurunan produksi, harga pokok penjualan, volume penjualan, dan minat daya saing negara asing lainnya.

Kata Kunci: Ekspor, Dumping, Tiongkok, Indonesia

ABSTRACT

Export and import activities play an important role in economic development and fulfillment of people's needs for a country. In its implementation, competition between countries cannot be avoided. This triggers illegal actions by selling products abroad lower than the selling price in the country of origin or what is commonly referred to as dumping. China was involved in 10 dumping cases in Indonesia in 2021-2022 and 4 of them were subject to Anti Dumping Import Duty (BMAD). China carries out dumping politics in Indonesia in order to strengthen power and influence in the international sphere and improve the country's economy which causes many losses for Indonesia. In this study, the researcher will use the neo mercantilism theory written by Fu-Lai Tony Yu to analyze the reasons for China to practice political dumping in Indonesia in 2021-2022 and its impact on Indonesia. Based on the results of the analysis, China dumped in Indonesia to strengthen its economy, power, and influence on the international community. As a result of China's dumping, Indonesia suffered a number of losses in the domestic industrial sector such as decreased production, cost of goods sold, sales volume, and interest in the competitiveness of other foreign countries.

Keywords: *Export, dumping, China, Indonesia*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekspor dan impor merupakan sebuah aktivitas yang tidak bisa lepas dari sebuah negara di zaman sekarang. Ekspor dan impor berperan sebagai sarana pembangunan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat bagi sebuah negara (Anggraeni, 2015). Persaingan merupakan hal yang tidak dapat dihindari bagi negara-negara guna menguasai pangsa pasar di kancah internasional. Persaingan dapat dilakukan secara sehat dan curang yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar seperti praktek dumping. Praktek dumping merupakan sistem penjualan dimana harga jual produk di luar negeri lebih rendah dibandingkan dengan harga jual di negara asalnya. Tindakan dumping sendiri dilarang keras bagi dunia internasional karena dianggap menjatuhkan ekonomi negara. Tindakan dumping dilarang keras oleh *World Trade Organization* (WTO) dan sudah diatur dalam *Anti-Dumping Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*. *World Trade Organization* selaku organisasi perdagangan internasional telah menerima laporan tindakan dumping yang dilakukan oleh negara anggota sebanyak 3.427 kasus pada tahun 1995-2008 (Sanjaya, dkk., 2022). Sanjaya, dkk mengemukakan angka tertinggi sebagai negara pelaku tindakan dumping tertinggi ditempati Tiongkok dengan total 677 kasus, diikuti dengan Republik Korea sebanyak 252 kasus, dan Amerika Serikat sebanyak 189 kasus pada periode 1995-2008.

Pemerintah Indonesia mendirikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk mengantisipasi tindakan dumping guna menciptakan perdagangan dunia yang adil dan saling memberikan keuntungan. (Siregar, 2022) menyatakan bahwa tujuan utama dari didirikannya KADI adalah memberikan perlindungan bagi produsen dari Indonesia dari pengeksport yang melakukan tindakan dumping ataupun subsidi dari barang impor. Praktik dumping bukan merupakan hal yang baru bagi negara Indonesia, tercatat sebanyak 32 laporan kasus diterima oleh KADI pada tahun 2016-2022. Berdasarkan data laporan kasus yang diterima KADI Tiongkok terlibat di dalam 25 kasus dari total 32 kasus pada tahun 2016-2022. Tiongkok juga tercatat dengan 4 kasus yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dari total 10 kasus terlapor pada tahun 2021-2022.

Kasus pertama dari 4 kasus tindakan praktik dumping yang dilakukan Tiongkok adalah *sunset review* anti dumping terhadap produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* (BOPET). Produk BOPET yang terlapor sebagai produk dumping berbentuk pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak dikombinasi dengan bahan lain. Pada kasus ini Tiongkok, India, dan Thailand dikenakan BMAD atas tindakan dumping yang mereka lakukan pada tahun 2015 silam. KADI menerima laporan dari produsen dalam negeri produk BOPET yaitu PT. Kolon Ina dan PT. Trias Sentosa, Tbk untuk melakukan *Sunset review* terhadap produk BOPET. Perusahaan produsen meminta KADI melakukan *sunset Review* untuk peninjauan ulang apakah masih terjadi dumping pada produk ini seperti pada tahun 2015. Pihak produsen merasa dirugikan akibat impor produk BOPET dari Tiongkok, India, dan oleh karena itu KADI menerima laporan dari pihak produsen tersebut. Berdasarkan hasil

investigasi KADI, terdapat kerugian yang diterima produsen BOPET dalam negeri diantaranya adalah penurunan penjualan sebesar 11% meskipun angka konsumsi nasional meningkat 10%, sedangkan impor dari ketiga negara terus meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 4%. Hal tersebut menyebabkan turunnya secara drastis pangsa pasar produsen dalam negeri BOPET menjadi 11%. Hasil keseluruhan dari penyelidikan yang telah dilakukan KADI ditemukan bahwa Tiongkok, India, dan Thailand terbukti masih melakukan praktik dumping. Akibat dari tindakan praktik dumping Tiongkok, India, dan Thailand yang masih terus berjalan Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.010/2021 tentang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* (BOPET) dari negara Tiongkok, India, dan Thailand.

Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy) merupakan produk dumping kedua yang dilakukan oleh Tiongkok di Indonesia pada tahun 2022. HRC Alloy merupakan baja campuran yang berbentuk gulungan, produk ini merupakan salah satu bahan penting sebagai bahan pembangunan industri ataupun bahan untuk membuat alat-alat yang dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari. KADI menerima laporan dari PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk atas tindakan dumping HRC Alloy pada tahun 2018. Produsen produk HRC Alloy di Indonesia mengalami peningkatan penjualan yang tidak memuaskan sebesar 3%, hal tersebut diakibatkan impor Tiongkok yang meningkat dengan sebesar 24% pada periode yang sama yaitu 2016-2019. Berhasilkan hasil dari penyelidikan KADI, produk HRC Alloy yang berasal dari perusahaan asal Tiongkok terbukti atas tindakan dumping. Tindakan tegas yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berupa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.010/2022 yang berisi tentang pengenaan BMAD terhadap dumping produk HRC Alloy oleh Tiongkok.

Kasus praktik dumping ketiga yang dilakukan oleh Tiongkok di Indonesia adalah dumping produk *Lysine*. Penyelidikan dumping atas produk tersebut dilakukan oleh KADI pada 23 Maret 2020 setelah menerima laporan dari produsen dalam negeri produk tersebut yaitu PT. Cheil Jedang Indonesia (CJI). Data dari KADI menunjukkan penjualan produk bagi industri dalam negeri mengalami penurunan sebesar 2,9% dikarenakan impor dari Tiongkok yang meningkat sebesar 40,8% ditengah peningkatan konsumsi nasional sebesar 13,3% pada periode 2016-2019. Hasil yang didapatkan dari penyelidikan KADI adalah ditemukan margin dumping perusahaan asal Tiongkok sebesar 6,02% - 33.20%. Oleh karena itu Tiongkok yang telah terbukti melakukan praktik dumping atas produk *Lysine* dikenakan BMAD melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 40/PMK.010/2022.

Praktik dumping keempat yang dilakukan oleh Tiongkok di Indonesia tahun 2022 adalah *sunset review* terhadap dumping produk *Polyester Staple Fiber* (PSF) yang sebelumnya sudah dikenakan BMAD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.010/2019. Laporan yang diterima KADI terhadap kasus ini menyatakan bahwa pihak produsen SPF Indonesia masih mengalami kerugian setelah pengenaan BMAD terhadap produk SPF pada tahun 2019. Setelah diselidiki oleh KADI produsen produk SPF mengalami kerugian berupa penurunan penjualan produk di dalam negeri sebesar 27% akibat tingginya volume impor dari Tiongkok setiap tahunnya pada tahun 2018-2020. Hasil

penyelidikan mengatakan bahwa Tiongkok, India, dan Taiwan terbukti masih melakukan tindak praktik dumping terhadap produk SPF. Akibat dari tindakan dumping tersebut, Tiongkok, India, dan Taiwan penerapan BMAD yang sebelumnya akan tetap dilanjutkan sesuai dengan PMK Nomor 114/PMK.010/2019 diubah menjadi PMK Nomor 32/PMK.010/2022.

Sebagai negara anggota *World Trade Organization* (WTO), negara-negara harus mampu melindungi negara dari tindakan dumping yang merugikan ini berdasarkan dengan *Anti-Dumping Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*. Indonesia sendiri menerapkan peraturan agar memproteksi negara dari tindakan dumping seperti Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 yang berbunyi “ *Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan bea masuk antidumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian*”. Pemerintah Indonesia perlu melaksanakan ketentuan pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, untuk menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Bea Masuk AntiDumping terhadap Impor Produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* (BOPET), *Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel* (HRC Alloy), *Lysine*, dan *Polyester Staple Fiber* (PSF) yang berasal dari Tiongkok. Berdasarkan 4 kasus praktik dumping tersebut yang telah terbukti melalui penyelidikan KADI, masing-masing perusahaan yang terlibat kasus dikenakan BMAD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan besaran yang berbeda-beda.

Berdasarkan laporan data utama penyelidikan KADI, keempat kasus dumping yang dilakukan Tiongkok memberikan dampak kerugian bagi industri dalam negeri. Pada kasus dumping produk BOPET volume impor di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data resmi dari KADI, Tiongkok memiliki volume impor sebesar 36.532 Metrik Ton (MT) dan terus meningkat ke angka 47.501 MT dengan rata-rata peningkatan sebesar 14% diikuti dengan Thailand sebesar 15%, dan India 85% pada periode 2016-2018. Industri dalam negeri Indonesia mengalami penurunan penjualan sebesar 3% akibat dari volume impor pada periode tersebut. Selain itu, angka tersebut terus menerus meningkat dan berkembang hingga periode tahun 2021-2022. Dumping yang dilakukan Tiongkok melalui produk tersebut dijatuhi BMAD oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.010/2021.

Berdasarkan data laporan hasil akhir KADI, pada kasus HRC Alloy volume impor Tiongkok meningkat sebesar 24% sedangkan impor dari negara lain menurun sebesar 22% yang menimbulkan persaingan tidak sehat dan dampak penurunan penjualan domestik industri dalam negeri pada tahun 2016-2018. Angka tersebut terus menerus meningkat hingga dumping produk HRC Alloy dikenakan BMAD pada tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.010/2022 dumping Tiongkok terhadap produk HRC Alloy dikenakan BMAD. Berdasarkan data dari laporan akhir hasil KADI, kasus dumping *Lysine* Tiongkok juga menguasai impor di Indonesia dengan peningkatan sebesar 40,8% dan menguasai pangsa pasar dengan peningkatan setiap tahunnya sebesar 16,7% pada periode 2017-2019. Akibat dari hal tersebut, negara

pengekspor lain mengalami penurunan impor yang sangat drastis dengan persentase sebesar 75,6% dan Indonesia mengalami penurunan pada harga penjualan domestik sebesar 8% pada periode tersebut. Serupa seperti yang terjadi pada kasus BOPET dan HRC Alloy, kerugian yang dialami pihak Indonesia terus meningkat hingga para pelaku dumping produk ini dikenakan BMAD pada tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.010/2022 pelaku praktik dumping produk *Lysine* dikenakan BMAD. Pada kasus dumping SPF Tiongkok, Taiwan dan India menyebabkan kerugian pada volume dan nilai penjualan domestik yang menurun sebesar 11% dan 29%, harga domestik sebesar 21%, dan harga pokok penjualan sebesar 17% pada periode 2018-2020. Keseluruhan praktik dumping yang dilakukan Tiongkok di Indonesia pada tahun 2021-2022 terus memberikan kerugian bagi Indonesia hingga dikenakan BMAD. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.010/2022 para pelaku praktik dumping produk SPF termasuk Tiongkok dikenakan BMAD. Periode tahun 2021-2022 merupakan periode tahun dimana seluruh dunia sedang berada dalam masa pemulihan pasca pandemic *Covid-19*. Akan tetapi, pada saat periode tersebut Tiongkok sukses meningkatkan laju perekonomian. Dibalik kesuksesan Tiongkok tersebut terjadi tindak kecurangan seperti praktik dumping yang dilakukan Tiongkok di Indonesia pada tahun 2021-2022. Seluruh tindakan dumping Tiongkok tersebut memberikan dampak bagi industri dalam negeri di Indonesia dan menimbulkan pertanyaan, untuk apa Tiongkok melakukan praktik dumping di Indonesia pada tahun 2021-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Tiongkok melakukan politik dumping di Indonesia pada tahun 2021-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong Tiongkok melakukan politik dumping di Indonesia pada tahun 2021-2022.
2. Menganalisis dimensi politik dari perdagangan internasional antara Tiongkok dan Indonesia.
3. Memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam politik dumping Tiongkok di Indonesia.

1.4 Cakupan penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai praktik politik dumping yang dilakukan Tiongkok pada 4 kasus yang berbeda dan terbukti melakukan praktik dumping pada tahun 2021-2022. Kasus yang pertama adalah *sunset review* produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* yang dikenakan BMAD pada tahun 2021, kemudian dumping produk *Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel* (HRC Alloy) dikenakan BMAD pada tahun 2022. Kasus ketiga dan keempat adalah dumping produk *Lysine* dan *Polyester Staple Fiber (SPF)* pada tahun 2022.

Peneliti akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari praktik dumping Tiongkok di Indonesia tahun 2021-2022. Peneliti memilih rentang tahun 2021-2022 karena pada tahun tersebut merupakan masa pemulihan pasca pandemi

Covid-19 akan tetapi Tiongkok sudah terlibat 9 dari 10 kasus dan dikenakan BMAD sebanyak 4 kasus, serta rentang tahun tersebut merupakan tahun yang baru saja terjadi sehingga kasus yang diangkat merupakan kasus terbaru.

1.5 Tinjauan Pustaka

Anggraeni (2015) berpendapat bahwa kegiatan ekspor dan impor merupakan aktivitas penting bagi sebuah negara karena berperan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan sebagai sarana pembangunan negara. Akan tetapi, aktivitas ekspor dan impor tidak terlepas dari tindak kecurangan sebuah negara agar meraih keuntungan yang lebih besar seperti dengan menjual produk dengan harga dibawah harga wajar. Berdasarkan aturan *The General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dumping merupakan tindakan yang terjadi ketika sebuah produk masuk ke pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga normal di negara pengekspor. Negara dapat melaporkan praktik dumping kepada WTO jika merasa dirugikan dengan data yang mendukung kerugian tersebut. Praktik dumping sudah sering terjadi sejak dahulu, *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi internasional menerima laporan atas tuduhan dumping yang dilakukan negara anggota sebanyak 3.427 kasus pada tahun 1995-2008. Praktik dumping yang terjadi melibatkan 100 negara tertuduh dan sebanyak 43 negara pelapor pada periode tersebut. Tiongkok menjadi negara paling banyak tertuduh atas tindakan dumping yaitu 677 kasus, diikuti dengan Republik Korea 252 kasus, Amerika Serikat 189 kasus, dan Taiwan dengan 187 kasus pada periode tersebut.

Sanjaya, dkk (2022) menjelaskan bahwa praktik dumping merupakan sebuah praktik ekspor dengan menjual produk atau komoditi dengan harga yang lebih

rendah di luar negara asal produk tersebut dibandingkan harga di negara asalnya. Sanjaya, dkk mendeskripsikan praktik dumping sebagai salah satu praktik perdagangan internasional yang tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara importir. Kasus dumping sendiri pernah terjadi dan sudah banyak di Indonesia, berdasarkan data dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terdapat 4 kasus dumping yang dilakukan Tiongkok di Indonesia dan sudah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping pada tahun 2021-2022. Kasus tersebut adalah dumping *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET)*, *Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)*, *Lysine*, dan *Polyester Staple Fiber (SPF)* yang dilakukan perusahaan asal Tiongkok. Dalam keempat kasus ini, KADI menerima laporan, kemudian mulai melakukan penyelidikan. Pada proses penyelidikan KADI meminta sejumlah perusahaan yang terlapor beserta afiliasinya untuk mengisi kuesioner sebagai salah satu bentuk prosedur penyelidikan. Berdasarkan hasil dari penyelidikan KADI, keempat kasus dumping yang dilakukan Tiongkok terbukti melakukan praktik dumping dan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.

Sementara itu, Siregar (2022) mengatakan bahwa dumping merupakan tindakan yang dilarang oleh World Trade Organization (WTO) selaku organisasi perdagangan internasional. Tindakan dumping sendiri diatur oleh WTO dalam *Anti-Dumping Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*. Seluruh negara yang bermitra dengan WTO wajib mematuhi dan mengikuti peraturan ini, hal ini bertujuan untuk kelancaran arus perdagangan internasional. Dalam mengatasi tindakan dumping, pemerintah Indonesia mempunyai lembaga khusus yakni Komite Anti Dumping (KADI) yang bertugas khusus meneliti, mengusulkan

pengenaan bea ,menyelidiki dan membuat laporan terhadap tindakan dumping. Barang yang dapat dikategorikan sebagai dumping sudah diatur oleh pemerintah Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 mengenai Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan pada Pasal 1 ayat (1). Berdasarkan peraturan tersebut barang dumping sendiri diartikan sebagai barang yang diimpor dengan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai normal di negara asal pengeksport barang tersebut. Tindakan dumping sendiri memberikan banyak kerugian bagi negara tujuan ekspor pelaku dumping, akibat dari tindakan itu industri dalam negeri Indonesia mengalami banyak kerugian dari berbagai sisi seperti harga, volume produksi dan pangsa pasar.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori Neo-Merkantilisme

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teori Neo-Merkantilisme yang merupakan model politik dan ekonomi dengan menekankan kekuatan atau kekuasaan sebagai sentral Neo-Merkantilisme yang memiliki sifat menyatukan kepentingan ekonomi dan nasional. Tiongkok sendiri memiliki strategi Neo-Merkantilisme berupa promosi nasionalisme dan patriotisme, menimbun atau menyimpan emas, cadangan devisa, dan neraca pembayaran yang menguntungkan melalui manipulasi nilai tukar, tarif, subsidi ekspor, dan perlindungan lainnya (Yu, 2019). Yu membagi Neo-Merkantilisme menjadi enam kerangka pemikiran yaitu *Promoting Nationalism and Patriotism, Bullionism and Hard Currencies Accumulation, Maintaining a Favovrable Balance of Trade, Technologicalism, Strategic Global Expansion, dan Population Policy for a Strong Nation.*

1. *Promoting Nationalism and Patriotism* berarti mempromosikan nasionalisme dan patriotisme guna mencapai sebuah tujuan. Berbagai macam hal yang dapat menjadi representasi dari nasionalisme dan patriotisme baik itu berupa komoditas, gagasan, ataupun lainnya dijadikan sebagai alat untuk dipromosikan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada zaman Dinasti Ch'ing promosi nasionalisme dan patriotisme digunakan untuk menutupi kepemimpinan yang rusak. Pada era zaman sekarang promosi nasionalisme dan patriotisme berperan penting untuk memperkuat suatu negara demi membangun negara yang makmur. Presiden Tiongkok Xi Jinping membuat nasionalisme dan patriotisme menjadi *The great Chinese Dream* pada tahun 2012. *Chinese Dream* merupakan penyatuan aspirasi masyarakat Tiongkok dan mengintegrasikan nasional guna mencapai kemakmuran ekonomi, kebebasan nasional dan bebas dari dominasi bangsa asing. Pada kasus ini Tiongkok melakukan dumping agar menguasai pasar di Indonesia dan hal tersebut dapat menjadi wadah dari promosi nasionalisme dan patriotisme Tiongkok.
2. *Bullionism and Hard Currencies Accumulation* memiliki pandangan bahwa emas dan perak adalah kekayaan dan kekuatan dari sebuah negara. Sedangkan *Hard Currency* merupakan alat pembayaran dalam transaksi perekonomian internasional yang berupa mata uang negara asing. Pada variabel ini menjelaskan bahwasanya cadangan emas mampu menjadikan sebuah mata uang menjadi mata uang *Hard Currency* yang digunakan dalam transaksi perekonomian di level internasional. Tiongkok merupakan negara dengan kepemilikan emas terbesar keenam di dunia (Wu, 2017).

Tiongkok tercatat memiliki 1.843 ton emas pada tahun 2016 dan sejak tahun 2009 angka kepemilikannya terus meningkat hingga 60%. Tiongkok menggunakan kepemilikan emasnya sebagai strategi untuk menghadapi dominasi Amerika Serikat pada tingkat dunia. Tiongkok berhasil memperkuat mata uang mereka dengan seluruh jumlah kepemilikan emas mereka. Tiongkok juga merupakan negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia sebesar US\$3,12 triliun pada tahun 2016.

3. *Maintaining a Favorable Balance of Trade* merupakan salah satu strategi guna menjaga dan mempertahankan agar terciptanya neraca perdagangan yang menguntungkan. Perdagangan yang menguntungkan akan memberikan negara kekuatan dan kemajuan perekonomian. Dalam menjaga hal tersebut Tiongkok melakukan sejumlah kebijakan untuk mempertahankan neraca dagang yang menguntungkan seperti dengan cara meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Pemerintah Tiongkok membantu perusahaan di negara mereka untuk mengejar teknologi asing dengan memaksa perusahaan asing mentransfer teknologi mereka kepada perusahaan Tiongkok dengan cara mengontrol pembelian asing dan persyaratan usaha. Tiongkok juga memanipulasi nilai tukar mereka melalui ekspor untuk mendukung pertumbuhan tenaga kerja. Selain itu, Tiongkok menggunakan tarif untuk mencapai neraca perdagangan yang menguntungkan. Tiongkok meningkatkan tarif atas impor hingga menyentuh angka 9,6% pada tahun 2009 dimana Amerika Serikat hanya menetapkan sebesar 3,5% pada tahun yang sama. Tiongkok juga melakukan tindakan yang dilarang oleh WTO selaku organisasi perdagangan dunia

yaitu subsidi ekspor. Pemerintah Tiongkok memberi subsidi ekspor yang nilainya mencapai jumlah 1.5 juta Dollar dengan 33 perusahaan yang mendapatkan subsidi tersebut pada tahun tahun 2001. Pemerintah Tiongkok terus meningkatkan angka subsidi ekspor dari tahun ke tahun, tercatat 2,4 miliar dolar pada tahun 2004 dan 15 miliar dollar pada tahun 2007. Tiongkok melakukan praktik dumping di Indonesia merupakan salah satu tindakan yang membantu Tiongkok dalam mencapai neraca perdagangan yang menguntungkan.

4. *Technologicalism* berarti ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pondasi dari bangsa yang kuat. Kemajuan dan inovasi dari teknologi akan mendirikan pondasi yang kuat serta memudahkan dalam segala aktivitas pemenuhan kepentingan sebuah negara. Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi akan semakin memiliki peran penting bagi sebuah negara dalam setiap pemenuhan kepentingan. Hal tersebut terus mendorong negara-negara di level global untuk bersaing guna memajukan teknologi. Tiongkok memfokuskan teknologi sebagai penunjang kinerja perusahaan domestik dan wadah untuk menjalin kerjasama dengan mitra internasional. Dewan Negara Tiongkok mengerahkan rencana untuk menjadikan Tiongkok sebaagai negara dengan kemampuan inovasi 15 besar dunia. Rencana tersebut akan memberikan perkembangan inovasi dan tekonologi Tiongkok, yaitu 13th *Five-Year Plan*. Tiongkok mampu melakukan ekspor hasil industri ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia sebagai hasil dari keberhasilan promosi teknologi dan industri.

5. *Strategic Global Expansion* atau strategi ekspansi global, merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pengaruh sebuah negara terhadap negara lainnya dengan beberapa kebijakan. Ekspansi global akan memberikan kekuatan dan pengaruh yang besar bagi negara pelaksana ekspansi terhadap negara atau wilayah yang akan dituju. Zhang (2016) menyatakan bahwa Tiongkok melakukan strategi ekspansi global untuk mengumpulkan kekayaan bagi negara. Tiongkok memiliki tiga strategi untuk melaksanakan strategi ekspansi global yakni *One Belt One Road Initiative* yang kemudian disempurnakan menjadi *Belt and Road Initiative (BRI)* dan *The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*. Selain melalui dua strategi tersebut, Tiongkok akan melakukan ekspansi terhadap negara dunia ketiga guna mengumpulkan kekayaan bagi negara.
6. *Population Policy for a Strong Nation*, merupakan kebijakan sebuah negara dalam mengatasi populasi agar seimbang tidak berlebihan dan tidak kekurangan penduduk agar menciptakan perekonomian dan kekuatan negara yang stabil. Populasi merupakan syarat penting untuk diakuinya sebuah negara serta populasi memiliki peran penting dalam perkembangan sebuah negara. Neo-Merkantilisme Tiongkok percaya bahwa populasi akan membantu membangun sebuah negara yang kuat melalui kebijakan satu anak dan naturalisasi yang ketat. Kebijakan tersebut diterapkan pemerintah Tiongkok karena populasi yang sudah sangat berlebihan. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu kebijakan satu anak dihapuskan dan diganti menjadi kebijakan dua anak.

1.7 Argumen Sementara

Tiongkok melakukan politik dumping di Indonesia pada tahun 2021-2022 karena merupakan bagian dari upaya peningkatan perekonomian, kekuatan dan pengaruh negara Tiongkok di tingkat internasional. Hal ini dapat dilihat dari enam strategi yang diterapkan, yaitu *Promoting Nationalism and Patriotism, Bullionism and Hard Currencies Accumulation, Maintaining a Favovrable Balance of Trade, Technologicalism, Strategic Global Expansion*, dan *Population Policy for a Strong Nation*. Pemerintah Tiongkok menggunakan enam strategi tersebut untuk mencapai tujuan utama negara mereka melalui praktik dumping, serta menerapkan strategi tersebut kepada perusahaan di negara mereka agar dapat menguasai pasar di tingkat internasional salah satunya di Indonesia pada tahun 2021-2022. Indonesia mengalami sejumlah kerugian akibat dari 4 kasus praktik dumping Tiongkok melalui enam strategi tersebut, terutama pada sektor industri yang mengalami penurunan produksi, penurunan harga produk, dan penurunan penjualan produk pada tahun 2021-2022.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penggunaan metode penelitian kualitatif dapat menjelaskan dan menggali fenomena ini secara mendalam.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah negara Tiongkok. Objek pada penelitian ini adalah praktik politik dumping yang dilakukan Tiongkok di Indonesia Tahun 2021-2022.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini melalui studi literatur, baik berupa jurnal, buku, laporan akademik, media massa, ataupun literatur lainnya yang dapat memberikatan data valid.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian pada penelitian ini akan melalui analisis data yang ditemukan dari studi literatur yang valid, dan kemudian akan dianalisis menggunakan kerangka pemikiran teori Neo-Merkantilisme.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai Praktik Politik Dumping Tiongkok: Studi Kasus di Indonesia Tahun 2021-2022 melalui empat BAB. Pada BAB I akan membahas pendahuluan yang berisi tentang latar belakang studi dan penelitian ini, dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara dan metode penelitian. Pada BAB II akan membahas tiga variable Neo Merkantilisme yang bersifat strategi domestik. Sedangkan pada BAB III akan membahas tiga variabel Neo-Merkantilisme yang bersifat strategi luar negeri. Pada

BAB IV peneliti akan membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian beserta dengan rekomendasi.

BAB II

Praktik dumping melalui Kerangka Neo-Merkantilisme

2.1. Promoting Nationalism and Patriotism

Nasionalisme dan patriotisme Tiongkok berakar pada kekaisaran Tiongkok zaman dahulu tepatnya pada masa akhir Dinasti Ch'ing dan digunakan untuk mengalihkan perhatian orang dari tindakan pemerintah yang kotor (Yu, 2019). Selain sebagai alat pengalihan isu, nasionalisme dan patriotisme dieksploitasi secara ekstrim sehingga menghasilkan revolusi kebudayaan. Nasionalisme Tiongkok terdahulu pada era sebelum Sun Yat Sen belum memiliki identitas yang jelas dan cenderung identik dengan kosmopolitanisme yang berbentuk komunisme (Nusarastriya, 2015). Pada era tersebut nasionalisme perlahan mulai memiliki kedudukan tersendiri pada prinsip *The Three People's Principles* di dalam tulisan Sun Yat Sen yang berjudul *San MinChu* I. Pada *San MinChu* I nasionalisme menjadi salah satu dari tiga prinsip penting yaitu demokrasi dan sosialisme dalam kehidupan berbangsa dan negara Tiongkok. Pada tahun 1979 Tiongkok menerapkan kebijakan *Open Door* yang mengakibatkan bercampurnya budaya Tiongkok dengan budaya asing. Hal tersebut menyebabkan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme masyarakat Tiongkok, dimana rasa nasionalisme dan patriotisme masih dibutuhkan bagi negara. Selain sebagai alat untuk melindungi negara, nasionalisme dan patriotisme dapat menjadi kunci utama yang dapat menjadi kekuatan pendorong pengendalian hubungan luar negeri Tiongkok dengan negara lain (Zhimin, 2005). Promosi nasionalisme dan patriotisme Tiongkok dengan tujuan pembangunan ekonomi, pembangunan bangsa, persatuan politik dan

kebesaran nama Tiongkok dapat diterima oleh masyarakat global karena hal tersebut tidak merugikan pihak lain.

Seiring berkembangnya zaman, nasionalisme dan patriotisme dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah gagasan baru yaitu “*Chinese Dream*” oleh Xi Jinping selaku Presiden Tiongkok pada tahun 2012. Gagasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran perekonomian masyarakat Tiongkok, merebut kebanggaan nasional, dan bebas dominasi bangsa asing. Pada saat *Chinese Dream* dirumuskan di dalam pidato Xi Jinping pada Kongres Rakyat Nasional kedua belas, Xi menegaskan bahwa kunci utama dari *Chinese Dream* adalah *Great Revival of China* (Kebangkitan Besar Tiongkok). Kepala Departemen Publisitas *Chinese Communist Party’s*, (CCP) Liu Qibao menganggap *Chinese Dream* sebagai kepemimpinan baru pernyataan misi dan manifesto politik bagi masa depan partai dan negara. Memahami konsep *Chinese Dream* merupakan hal yang penting untuk mengerti pemerintahan Xi Jinping dan orientasi kebijakan masa depan Tiongkok (Wang, 2013). Xi percaya mimpi terbesar negara Tiongkok adalah mewujudkan peremajaan bangsa Tiongkok. Gagasan *Chinese Dream* terhubung dengan nasionalisme dan patriotisme karena sama-sama menyetujui gagasan *The Great Rejuvenation of the Chinese Nation*.

The Rejuvenation atau peremajaan memiliki tujuan untuk menguatkan integritas dan kedaulatan teritorial Tiongkok dari sisa penghinaan masa lalu yang berasal dari kekuatan kolonial ataupun perang (Kallio, 2015). Kallio selaku peneliti bertanya terhadap media yang stabil membahas tentang *Chinese Dream*, apakah realisasi dari *Chinese Dream* mampu menantang Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Para pakar percaya bahwa Tiongkok harus mencoba untuk memberikan

pengaruh pada sistem internasional untuk menantang dominasi barat. Konsep *The Rejuvenation* mewakili impian dari masyarakat Tiongkok untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara yang kuat, makmur dan bebas dari dominasi bangsa asing. Selain itu, tertanam di dalam pendidikan dan budaya bahwa konsep *The Rejuvenation* menjadi pilar penting untuk membangun identitas nasional Tiongkok. Killo menyatakan untuk mengidentifikasi makna sebenarnya dari *Chinese Dream* diperlukan pemahaman terhadap sejarah Tiongkok beserta dengan pemahaman identitas nasional Tiongkok. Hal ini berkaitan dengan konsep *The Rejuvenation* karena sangat terikat satu sama lain dengan pemahaman sejarah Tiongkok. Narasi *Chinese Dream* sendiri dianggap sebagai versi terbaru dari *The Rejuvenation* dan transisi narasi menuju masa depan, karena *Chinese Dream* lebih berfokus menjadikan Tiongkok sebagai negara yang lebih kuat, maju, makmur, dan tempat yang lebih baik.

Dalam menguraikan narasi *Chinese Dream*, Xi sering menggunakan konsep “*Two 100-years*” yang dianggap lebih konkret daripada *Rejuvenation*. Xi menyatakan Tiongkok akan menjadi negara dengan masyarakat yang cukup makmur pada tahun 2021 tepat dengan ulang tahun ke-100 Partai Komunis Tiongkok, dan Tiongkok akan menjadi negara yang berkembang dengan sepenuhnya pada tahun 2049. Gagasan *Chinese Dream* Xi melanjutkan tradisi CCP dengan memberikan gambaran yang penuh warna di masa depan. Wang berpendapat bahwa hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan masyarakat Tiongkok bahwa *Chinese Dream* akan mengarah kepada peningkatan tempat tinggal, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Narasi *Chinese Dream* merupakan bentuk baru dari *The Rejuvenation*. Narasi *Chinese Dream* juga

dianggap lebih unggul dibandingkan *The Rejuvenation* karena akan memfokuskan Tiongkok sebagai negara yang memiliki kekuatan yang besar, kemakmuran, dan kemajuan. *Chinese Dream* sangat berakar terhadap sejarah terdahulu Tiongkok karena *Chinese Dream* merupakan transisi baru menuju masa depan yang cerah. Meskipun mudah dipahami di dalam negeri, *Chinese Dream* akan sulit dipahami bagi dunia luar karena sangat berakar kepada sejarah terdahulu. Akan tetapi, *Chinese Dream* tidak diterima oleh semua pihak di dalam negeri dan menimbulkan masalah domestik.

Pada dasarnya *Chinese Dream* terinspirasi dari *American Dream* dan merupakan bentuk baru dari *The Rejuvenation*. *Chinese Dream* lebih kompleks dibandingkan dengan *The Rejuvenation* karena mengandung politik, filosofi, sejarah, budaya, serta keperluan masyarakat Tiongkok di dalamnya. Selain bagi masyarakat Tiongkok, *Chinese Dream* juga dirancang untuk masyarakat dunia meskipun segala sesuatu di dalamnya berkaitan kuat dengan identitas negara Tiongkok. Narasi *Chinese Dream* sendiri tidak mendapatkan nilai positif sepenuhnya bagi bangsa barat, terdapat banyak kecurigaan terhadap narasi yang dikeluarkan presiden Xi Jinping ini (Li, 2015).

Muncul beberapa kritikan terhadap narasi *Chinese Dream* yang dikeluarkan Xi Jinping karena dianggap belum sempurna. Narasi *Chinese Dream* tidak memiliki tujuan yang jelas terhadap kebijakan luar negeri Tiongkok dan dampak terhadap dunia internasional. Selain itu, Narasi *Chinese Dream* terlalu berlandaskan identitas Tiongkok yang dimana hal tersebut tidak akan mudah diterima oleh masyarakat negara asing di lingkup internasional. Xi Jinping beserta CCP diharapkan untuk menambah tujuan dan interpretasi baru dalam *Chinese Dream* agar memberikan

dampak yang lebih baik. Melalui *Chinese Dream* dan *The Rejuvenation* promosi nasionalisme dan patriotisme Tiongkok dapat tersampaikan pada dunia internasional meskipun tidak seluruhnya mampu menerima.

Promosi nasionalisme dan patriotisme yang dilakukan Tiongkok digunakakan untuk meningkatkan perekonomian dan bebas dominasi bangsa asing. Berdasarkan data dari statista.com Tiongkok merupakan negara dengan produksi baja terbesar pada tahun 2021-2022 dengan total produksi 120 juta ton metrik dan 88.3 juta ton metrik. Dengan memiliki nama sebagai negara dengan produksi baja terbesar di dunia, Tiongkok menggunakan hal ini sebagai salah satu strategi promosi nasionalisme dan patriotisme guna mendapatkan kekayaan dan kekuatan bagi negara. Hal tersebut diterapkan oleh pemerintah Tiongkok ke dalam praktik dumping produk baja, yaitu *Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)* pada tahun 2022. Pemerintah Tiongkok mendapatkan sejumlah keuntungan dari promosi nasionalisme dan patriotism melalui dumping produk HRC Alloy, perekonomian Tiongkok semakin meningkat serta pengaruh dan kekuasaan pada level internasional juga meningkat.

2.2. Technologicalism

Para pemimpin Tiongkok percaya bahwa melalui sains dan teknologi dapat membuat sebuah negara menjadi kuat dan berkuasa (Yu, 2019). Hu Jintao selaku arsitek pengembangan teknologi Tiongkok sekaligus mantan presiden mengeluarkan sebuah konsep pengembangan “*Scientific Development Concept*” yang fokus mengembangkan teknologi modern di Tiongkok (Hansen, 2014). Hansen mendeskripsikan pengembangan teknologi yang dilakukan Tiongkok

dirancang untuk membantu perusahaan domestik sambil menjaga hubungan kerjasama dengan mitra internasional.

Dewan Negara Tiongkok mencetuskan sebuah rencana untuk membuat Tiongkok menjadi negara inovatif dan memiliki kekuatan ilmiah serta teknologi pada tahun 2016. Rencana yang dicetuskan tersebut mengembangkan inovasi teknologi serta menyerukan untuk mempercepat proyek ilmiah dan teknologi nasional sekaligus menjadi rancangan dari *13th Five-Year Plan*. Melalui rencana tersebut, Tiongkok dapat menjadi negara 15 besar dalam hal kemampuan inovasi. Melalui kemajuan teknologi Tiongkok dapat mencapai sejumlah prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya seperti mampu menerbangkan pesawat ke luar angkasa, mengeksplorasi bumi lebih jauh, menciptakan teknologi komputer super.

Pada rencana lima tahun atau *Five-Year Plan* Tiongkok sudah ada sejak tahun 1953. Rencana lima tahun Tiongkok yang ke-13 merupakan rencana untuk periode tahun 2016-2020. Rencana lima tahun yang ke-13 memiliki tujuan utama untuk menyokong pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan industri baru yang strategis. Rencana lima tahun ke-13 ini berfokus terhadap pembangunan ekonomi dan sosial serta sistem industri baru yang modern. Rencana lima tahun ke-13 ini memiliki lima tujuan utama yaitu teknologi dan informatisasi, perlindungan terhadap lingkungan, pertumbuhan ekonomi, reformasi kelembagaan, pengurangan kemiskinan. Teknologi dan informatisasi merupakan peran penting guna mencapai lima tujuan utama dari rencana lima tahun Tiongkok ini. Selain berperan penting terhadap rencana lima tahun yang ke-13, rencana ini mampu meningkatkan inovasi dan kemajuan teknologi yang jauh lebih maju dari yang sebelumnya.

Pristiandaru (2023) mendeskripsikan bahwa Tiongkok merupakan negara yang memimpin kemajuan teknologi penting bagi dunia internasional. *Australian Strategic Policy Institute* (ASPI) mengatakan Tiongkok mampu menguasai 37 dari 44 teknologi penting seperti pada bidang pertahanan, robotika, kecerdasan buatan, energi, lingkungan, bioteknologi, material canggih, dan teknologi kuantum. Kemajuan teknologi dapat memicu dan mendorong perkembangan pada sektor lainnya. Tiongkok mampu melakukan ekspor berbagai hal ke luar negeri seperti barang ataupun jasa melalui keterampilan teknologi yang berkembang terus menerus. Hubungan kerjasama dengan mitra internasional terjalin dengan baik akibat dari ekspor dan kemajuan teknologi Tiongkok. Selain itu, kemajuan teknologi Tiongkok memberikan dampak positif bagi cadangan devisa negara, melalui ekspor yang terus menerus meningkat cadangan devisa negara juga semakin bertambah. Kemajuan inovasi teknologi Tiongkok memberikan dampak yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Keberhasilan pemerintah Tiongkok dalam pengembangan teknologi memberikan dampak positif bagi banyak sektor salah satunya adalah industri. Industri Tiongkok mampu berkembang melalui kemajuan teknologi karena kemajuan teknologi serta hubungan mitra kerja Tiongkok dengan negara asing semakin berjalan dengan baik. Melalui kemajuan teknologi kerjasama antar mitra Tiongkok mampu berjalan dengan baik seperti berhasil menjual kereta cepat ke Indonesia. Aktivitas perdagangan internasional Tiongkok menjadi lebih mudah berkat kemajuan dan pengembangan teknologi yang telah dilakukan pemerintah Tiongkok. Tiongkok berhasil menjual berbagai produk yang berbasis teknologi seperti ponsel pintar, laptop, dan komputer yang mampu memberikan kemudahan

dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Dalam sector ponsel pintar Tiongkok berhasil menjadi negara dengan produksi terbesar di dunia dengan dominasi melalui lima produk andalan mereka yaitu Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, dan Lenovo.

Kemajuan teknologi memberi peran penting bagi pertumbuhan perekonomian negara, produk domestik bruto (PDB) Tiongkok berkembang dengan pesat berkat kemajuan teknologi ini (Shan, 2018). Shan mendeskripsikan bahwa dengan pemanfaatan dan peningkatan teknologi dapat menjadi jembatan penting bagi Tiongkok untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan dan pemanfaatan teknologi dapat digunakan sebaik mungkin sebagai alat produksi yang mampu menunjang pembangunan perekonomian Tiongkok. Shan dalam penelitiannya menemukan bahwa perkembangan dan inovasi teknologi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teknologi juga menjadi faktor pendorong bagi pembangunan negara. Kemajuan teknologi mampu mendorong aspek lainnya yang membantu dalam pembangunan negara seperti pendidikan. Pendidikan Tiongkok dapat menjadi lebih maju melalui kemajuan dan inovasi teknologi. Para pelajar di Tiongkok dapat belajar banyak hal baru melalui kemajuan dan inovasi dari teknologi. Selain itu, teknologi juga memberi kemudahan dalam menjalankan kegiatan yang berbasis pendidikan bagi para pelajar di Tiongkok. Pada sektor lainnya seperti sektor lingkungan, kemajuan teknologi memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Kemajuan teknologi memberikan peningkatan pada intensitas energi dan emisi di Tiongkok.

Kemajuan teknologi yang berhasil dicapai Tiongkok memberikan keuntungan yang besar bagi negara Tiongkok. Melalui kemajuan teknologi,

Tiongkok semakin mudah untuk menjangkau mitra kerja internasional baik itu dalam lingkup regional asia ataupun diluar regional Tiongkok. Hal tersebut akan memberikan banyak dampak yang baik bagi perkembangan perekonomian Tiongkok serta membantu Tiongkok menyebarluaskan pengaruhnya terhadap dunia Internasional. Pada zaman modern sekarang terutama periode 2021-2022 kemajuan teknologi merupakan keuntungan bagi sebuah pemerintah negara dan masyarakat karena dapat memudahkan segala sesuatu aktivitas, kegiatan ataupun kepentingan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kemajuan teknologi, Tiongkok mampu mendapatkan keuntungan agar meningkatkan perekonomian negara serta kekuatan pada level internasional. Tiongkok semakin mudah menjangkau mitra pada tingkat internasional guna membangun kerjasama melalui teknologi. Selain itu, teknologi juga mampu menunjang aktivitas Tiongkok pada level internasional, salah satunya pada sektor perdagangan internasional. Kemajuan teknologi mempermudah dan mempercepat segala aktivitas yang terjadi pada level internasional seperti aktivitas ekspor dan impor. Tiongkok memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan meningkatkan secara terus menerus angka ekspor mereka, salah satunya ekspor ke Indonesia yang menjadi salah satu mitra kerja. Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tersebut, Tiongkok melakukan tindak kecurangan yaitu praktik dumping di Indonesia. Berdasarkan data laporan yang diterima KADI, Tiongkok terlibat dalam 10 kasus pada tahun 2021-2022, dan 4 diantaranya terbukti melakukan praktik dumping dan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Praktik dumping yang dilakukan Tiongkok melalui kemajuan teknologi mampu memberikan peningkatan perekonomian bagi negara Tiongkok.

2.3. Population Policy for a Strong Nation

Bagi negara besar di Eropa, populasi merupakan sebuah hal yang sangat dibutuhkan sebagai tenaga kerja selama abad ke-15 dan ke-16. Sedangkan populasi yang dimiliki Tiongkok sudah sangat berlebihan. Populasi Tiongkok menyentuh angka 1.412 miliar jiwa pada tahun 2021 dan 1.411 miliar jiwa pada tahun 2022 (CEIC DATA, 2022). Akibat dari populasi Tiongkok yang berlebihan pemerintah Tiongkok membuat kebijakan agar menekan populasi Tiongkok yang berlebihan, Tiongkok menganggap hal tersebut untuk membangun negara yang kuat. Kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah Tiongkok adalah *One-Child Policy* dan *Stringent Naturalization Policy* yang bertujuan untuk mengendalikan angka populasi.

Populasi Tiongkok mengalami lonjakan pada tahun 1949-1979 karena adanya kebijakan dari Mao Zedong selaku presiden yang memerintah di waktu itu. Mao membuat kebijakan yang pro terhadap kelahiran dan menganggap pertumbuhan populasi mampu memberdayakan negara. Populasi Tiongkok meningkat dua kali lipat dan mencapai jumlah 930 juta jiwa pasca meninggalnya Mao pada tahun 1976. Kelebihan populasi tersebut mengakibatkan terjadinya kekurangan pangan disertai dengan kekeringan.

Populasi yang berlebihan tersebut membuat kekhawatiran pemerintah Tiongkok meningkat. Populasi yang banyak maka diperlukan kapasitas sumber daya yang besar pula dan akan menimbulkan kekurangan sumber daya jika dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang. Kebijakan *One-Child* atau program satu anak berhasil diperkenalkan pada tahun 1979 untuk menekan angka populasi

yang berlebihan di Tiongkok. Kebijakan ini mewajibkan seluruh pasangan di Tiongkok memiliki satu orang anak saja. Kebijakan satu pasangan satu anak yang dicetuskan pemerintah Tiongkok ini berjalan selama 30 tahun sejak kebijakan ini diberlakukan. Kebijakan satu anak semakin diperketat pada tahun 2007 dan hanya boleh memiliki anak kedua jika anak pertama adalah perempuan. Kebijakan satu anak tersebut mengakibatkan populasi menurun drastis ini dan menyebabkan naiknya usia rata-rata populasi di Tiongkok. Menanggapi hal tersebut pemerintah Tiongkok mengurangi tenaga kerja muda demi menciptakan negara yang kuat dan makmur. Berkat kebijakan satu pasangan satu anak Tiongkok berhasil menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk menjadi populasi Tiongkok terendah sejak tahun 1949.

Kebijakan *One-Child* berakhir pada tahun 2015 dan digantikan dengan kebijakan yang memperbolehkan masyarakat memiliki dua anak pada tahun 2016. Kebijakan tersebut tidak berhasil menciptakan perubahan peningkatan angka kelahiran yang berkelanjutan (Barnard, 2023). Barnard menemukan dari data sensus 2020 bahwa krisis demografi dan ekonomi telah terjadi akibat angka populasi yang rendah, usia rata-rata populasi yang menua, serta tenaga kerja yang menyusut. Kebijakan dua anak tersebut tidak berlangsung lama dan hanya berlangsung selama periode 2016-2021. Hal tersebut terjadi seiring dengan pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan baru dimana pasangan di negara Tiongkok dapat memiliki tiga anak pada tahun 2021. Melalui kebijakan dua anak pemerintah Tiongkok berhasil membawa perubahan positif pada perkembangan demografi, kesehatan sosial, dan juga Pendidikan. Kebijakan dua anak berkontribusi besar terhadap peningkatan populasi Tiongkok pada tahun 2016-2017

yang membawa angka kelahiran sebesar 5,4 juta jiwa terhadap keluarga yang memiliki satu anak (Li, dkk., 2019). Akan tetapi di lain sisi kebijakan dua anak memberikan dampak bagi masyarakat seperti konflik kerja dan keluarga, stress pengasuhan terhadap anak, serta permasalahan perekonomian masyarakat (Hong, dkk., 2022).

Melalui undang-undang pemerintah Tiongkok secara resmi menerapkan kebijakan untuk memperbolehkan masyarakat untuk sebanyak-banyaknya memiliki tiga anak pada tahun 2021. Neo-Merkantilisme percaya bahwa dengan mengendalikan jumlah penduduk mampu menekankan kekuatan dan perekonomian negara. Melalui angka populasi yang tinggi akan mampu melahirkan tenaga kerja baru yang akan membantu perkembangan pada berbagai sektor yang membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian negara. Akibat berakhirnya kebijakan satu pasangan satu anak populasi Tiongkok kian meningkat sejak kebijakan memperbolehkan dua anak dan kemudian menjadi memperbolehkan satu pasangan tiga anak. Tercatat pada data [macrotrends.net](https://www.macrotrends.net) populasi Tiongkok menyentuh angka 1.425.893.465 jiwa penduduk pada tahun 2021, akan tetapi populasi Tiongkok mengalami penurunan kecil pada tahun 2022 menjadi 1.425.887.337 jiwa penduduk. Jumlah tersebut dapat memberikan banyak tenaga kerja bagi pemerintah Tiongkok, yang dimana hal tersebut menjadi langkah awal Tiongkok meningkatkan perekonomian negara.

Kebijakan kedua Tiongkok untuk mengendalikan angka populasi adalah *Stringent Naturalization Policy* atau kebijakan naturalisasi yang ketat. Tidak sembarang orang mampu mendapatkan kewarganegaraan Tiongkok, pemerintah Tiongkok hanya menginginkan warga negara dengan darah Tiongkok murni

sehingga dapat menyampaikan nasionalisme dengan efektif. Pada umumnya naturalisasi dilakukan pada bidang olahraga, dan hal tersebut menjadi tantangan bagi setiap negara dalam proses naturalisasi begitu juga bagi Tiongkok. Tidak hanya proses seleksi yang ketat dan sejumlah peraturan yang mengikat, akan tetapi etnis dan perbedaan budaya yang menghambat proses naturalisasi di Tiongkok.

Tiongkok tidak menerapkan kewarganegaraan ganda dan sangat menentang kebijakan tersebut. Kewarganegaraan Tiongkok merupakan salah satu kewarganegaraan tersulit untuk di dapatkan, Tiongkok hanya memiliki 1448 warga negara yang dinaturalisasi berdasarkan sensus Tiongkok 2010. Bagi Tiongkok naturalisasi ketat seperti ini memudahkan pemerintah melakukan kontrol sosial dan tata kelola yang lebih mudah.

Sejumlah kebijakan populasi yang diterapkan Tiongkok dilakukan guna menjaga usia rata-rata masyarakat Tiongkok agar tidak terjadinya penyusutan tenaga kerja. Jika jumlah tenaga kerja tetap terjaga maka hal tersebut mampu menciptakan perkembangan ekonomi bagi negara Tiongkok. Melalui jumlah tenaga kerja yang memadai Tiongkok mampu melakukan aktivitas seperti memproduksi komoditi dan mengekspor ke negara lain. Tiongkok memanfaatkan hal tersebut dengan meningkatkan laju ekspor dan melakukan praktik dumping di Indonesia tahun 2021-2022 agar menciptakan peningkatan perekonomian bagi Tiongkok dan kekuasaan pada level internasional.

BAB III

Praktik dumping melalui Kerangka Neo-Merkantilisme

3.1. Bullionism and Hard Currency Accumulation

Bullionisme merupakan pemikiran yang menganggap emas dan perak sebagai kekuatan dan kekayaan bagi sebuah bangsa. Emas dan perak masih digunakan Tiongkok sebagai strategi dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat pada urusan ditingkat global. Emas merupakan barang yang populer pada masa dinasti Zhou yaitu periode 1046-256 SM. Dinasti Zhou menjadi sejarah penting bagi sektor emas Tiongkok, pada zaman ini koin emas pertama kali dibuat. Pada dinasti Zhou koin emas mengalami persebaran yang luas yang menyebabkan angka produksi koin emas relatif tinggi pada masa itu (Zhang, dkk., 2014). Zhang dkk menemukan bahwa pada dinasti Han memiliki cadangan emas sebesar 41.3% dari cadangan emas Tiongkok pada tahun 2004 yang memiliki nilai total sebesar 600 ton. Sedangkan pada dinasti Tang ditemukan bahwa pada zaman itu angka produksi emas mencapai nilai sebesar 156 ton.

Produksi emas Tiongkok pada zaman dinasti Xia dan Shang hanya sebesar 20 ton dari 2645 ton emas di dunia (Tu, dkk., 2002). Seiring dengan berkembangnya zaman produksi emas Tiongkok terus menerus meningkat, tercatat produksi emas Tiongkok meningkat terus menerus sebesar 15% sejak 1988 dan menyentuh angka 100 ton pada tahun 1991. Tiongkok menjadi negara dengan produksi emas terbesar di dunia melewati Afrika Selatan pada tahun 2008. Emas dianggap sebagai investasi modal yang paling potensial dan berharga karena kelangkaannya, serta emas merupakan komoditas yang sangat berharga bagi industri perhiasan dan barang elektronik.

Melalui perkembangan industri emas dan perak, Tiongkok dapat menciptakan pertumbuhan yang menguntungkan bagi negara. Melalui ekspansi emas, hal tersebut akan memicu terdorongnya kemajuan teknologi serta kemajuan sumber daya manusia dan hal tersebut dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara dan masyarakat. Industri emas memberikan perkembangan pendapatan terus menerus selama 11 tahun kedepan dengan total keuntungan sebesar 24,87 miliar Yuan pada tahun 2010 (Xu, 2012). Gleason (2016) mengatakan laporan yang diterima atas kepemilikan emas Tiongkok meningkat sebesar 60% pada tahun 2009. Emas dihitung sebagai 2,2% cadangan devisa Tiongkok sebesar 1.843 ton dan termasuk ke dalam cadangan emas terbesar keenam di dunia pada tahun 2016 (Wu, 2017). Cadangan devisa memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai tukar mata uang.

Terdapat delapan jenis dalam nilai tukar, dua diantaranya yaitu *Fixed Exchange Rate* dan *Floating Exchange Rate*. Sistem nilai tukar tetap merupakan sebuah sistem dimana nilai tukar mata uang suatu negara secara tetap terhadap suatu mata uang negara lain. Sistem nilai tukar tetap dianggap lebih menguntungkan bagi negara berkembang karena lebih memfasilitasi perdagangan dan juga investasi. Selain itu, sistem nilai tukar tetap juga memberikan dampak inflasi yang lebih rendah. Nilai tukar tetap muncul pada tahun 1947 yang mengharuskan nilai tukar dikaitkan terhadap emas (Sulasmiyati, 2008). Pada periode waktu tersebut Tiongkok memilih untuk menyimpan cadangan emas sebanyak mungkin sebagai cadangan devisa negara yang dapat menguatkan mata uang Tiongkok.

Tiongkok sempat menggunakan sistem nilai tukar ganda pada tahun 1994, hal tersebut memberikan dua pilihan harga valuta asing terhadap Renminbi Tiongkok

(Yi, 2013). Nilai tukar Renminbi Tiongkok beralih mejadi lebih fleksibel setelah melepaskan nilai tukarnya terhadap Dollar AS pada tahun 2005. Yi menjelaskan setelah melepaskan nilai tukar Renminbi terhadap Dollar AS, nilai tukar Reniminbi terapresiasi sebesar 32% dan juga *Real Effective Exchange Rate* (REER) atau nilai tukar efektif ril meningkat sebesar 36% pada periode 2005-2013. Pemerintah Tiongkok memutuskan untuk mereformasi mekanisme nilai tukar berdasarkan dengan keranjang mata uang yang menekankan peran penawaran dan permintaan pasar pada tahun 2010. *People's Bank of China* (PBOC) mengurangi intervensi terhadap pasar semenjak pemerintah Tiongkok memperlebar batas mengambang Renminbi. Renminbi semakin berorientasi pada pasar yang memiliki peran dominan terhadap nilai tukar Renminbi. Peran permintaan dan penawaran dari pasar akan sangat berpengaruh pada nilai tukar Renminbi

Cadangan emas Tiongkok yang besar memberikan kemudahan untuk memenangkan kenaikan ke dalam kelompok mata uang elit *Special Drawing Rights* (SDR) dari *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 2016 (Yu, 2019). Gleason (2016) berkata bahwa perdagangan global dan pasar mata uang tidak lagi tertuju kepada Dollar AS, dominasi Dollar AS sekarang mendapat saingan dari Renminbi. Selain menimbun emas, Tiongkok menjadi negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia dengan akumulasi US\$3,12 triliun pada tahun 2016 (Wei, 2016).

Sebelum ditentukan menggunakan kurs mengambang, SDR dapat dikonversikan terhadap emas dengan nilai sebesar 0,888671 gram emas (Muafi, 2019). Muafi mendeskripsikan SDR sebagai keranjang mata uang khusus yang berisi beberapa mata uang yang sudah ditetapkan oleh IMF seperti Dollar AS, Euro,

Poundsterling, Yen, dan yang terakhir adalah Renminbi. SDR juga dapat diartikan sebagai hak penarikan khusus guna memenuhi cadangan devisa negara anggota IMF terhadap aset cadangan internasional yang telah disiapkan oleh IMF. Dalam proses penarikan cadangan internasional ini, negara anggota IMF akan mendapatkan kuota khusus yang akan ditinjau dari beberapa aspek di negara penarik seperti produk domestik bruto (PDB), cadangan devisa riil serta keterbukaan ekonomi negara penarik. Dalam keranjang mata uang SDR, Renminbi Tiongkok mendapatkan porsi bobot 10,92 % pada tahun 2015. Bobot tersebut merupakan bobot tertinggi ketiga pada tahun 2015 setelah Dollar AS dengan bobot sebesar 41,73% dan Euro dengan nilai bobot sebesar 30,93%.

Muafi di dalam penelitiannya menemukan bahwa dengan bergabungnya Renminbi Tiongkok kedalam keranjang mata uang SDR memberikan dampak yang baik bagi perekonomian negara. Cadangan devisa Tiongkok meningkat \$3,2 Triliun pada tahun 2016 setelah Renminbi bergabung ke dalam keranjang mata uang SDR. Bergabungnya Renminbi ke dalam keranjang mata uang SDR berhasil menarik banyaknya investor yang tertarik membeli saham perusahaan Tiongkok yang dominan dikuasai oleh pemerintah Tiongkok dan menyebabkan cadangan devisa Tiongkok meningkat. Akan tetapi, Tiongkok hanya menjual sedikit saham negara terhadap investor dan tidak lebih dari 30% karena tidak ingin di dominasi oleh negara asing.

Mildyanti & Triani (2019) mendeskripsikan bahwa cadangan devisa dapat meningkat melalui aktivitas ekspor lebih besar daripada impor, jika impor lebih besar daripada ekspor maka cadangan devisa akan mengalami penurunan. Ekspor Tiongkok hanya sebesar 0.75% atau senilai US\$ 9,7 miliar dari total keseluruhan

ekspor di dunia pada tahun 1978 (Zhang & Song, 2001). Angka ekspor Tiongkok terus menerus meningkat setiap tahunnya seiring dengan berkembangnya zaman. Perkembangan angka ekspor Tiongkok yang lebih besar dari pada impor menyebabkan cadangan devisa Tiongkok meningkat setiap tahunnya.

Cadangan devisa Tiongkok meningkat sebesar US\$ 11 miliar pada Desember 2022 dengan total cadangan devisa menjadi US\$ 3,128 triliun serta menjadi negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia (Alaydrus, 2023). Meskipun devisa negara Tiongkok meningkat pasca praktik dumping, nilai tukar Yuan melemah terhadap Dollar AS. Nilai tukar Yuan terhadap Dollar AS melemah dengan nilai 6,96 pada akhir tahun 2022 (Slota, 2023). Slota menjelaskan bahwa seiring dengan perannya dalam perekonomian global banyak tuduhan terhadap Tiongkok karena telah memanipulasi mata uang, hal tersebut akan menimbulkan ketertarikan bagi pembeli asing terhadap produk Tiongkok yang murah. Slota mendeskripsikan manipulasi mata uang sebagai hal yang sulit untuk diungkap dan dibuktikan dan karena itu tidak ada tindakan yang dapat diambil dalam mengatasinya. Melalui kebijakan pemerintah Tiongkok, Renminbi dapat bersaing dengan Dollar Amerika Serikat dalam perdagangan global dan pasar mata uang.

Cadangan emas, serta kenaikan mata uang Renminbi Tiongkok sebagai kelompok mata uang elit SDR memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan cadangan devisa. Dengan cadangan devisa yang besar maka Tiongkok dapat menjadi negara yang kuat dan memiliki perekonomian yang makmur. Tiongkok meningkatkan ekspor guna menciptakan peningkatan cadangan devisa, selain itu Tiongkok juga melakukan praktik dumping di Indonesia pada tahun 2021-

2022. Praktik dumping Tiongkok terhadap Indonesia membantu memberikan cadangan devisa dan menguatkan Tiongkok dari segi kekuasaan dan perekonomian.

3.2 Maintaining a Favorable Balance of Trade

Tiongkok menggunakan dua cara dalam meningkatkan neraca perdagangan mereka, yang pertama melalui meningkatkan ekspor dan mengurangi impor (Atkinson, 2012). Tiongkok melakukan manipulasi nilai tukar, menerapkan tarif tinggi dan subsidi terhadap ekspor untuk menunjang peningkatan ekspor dan mengurangi impor. Pemerintahan Tiongkok memberikan subsidi kepada berbagai macam jenis perusahaan yang bergerak pada bidang industri yang dapat memberikan keuntungan baik itu bagi pihak negara atau pihak perusahaan.

Subsidi berupa kontribusi finansial dari sebuah negara yang mampu mendorong perusahaan menjadi lebih maju, serta memiliki dampak yang positif pula bagi negara pemberi. Menurut Qomara (2015) perusahaan milik negara akan diberikan subsidi berupa pengurangan pajak bagi perusahaan, di lain sisi pemerintah juga dapat memberikan perusahaan pesaing yang bukan milik negara berupa pinalti. Menurut Staszheim (2008), dengan kebijakan pemerintah Tiongkok tersebut dapat menjadi pondasi untuk mengurangi persaingan antara perusahaan multinasional milik asing dengan perusahaan multinasional milik negara. Matano (2021) mengatakan bahwasanya subsidi merupakan alasan utama dari kesuksesan Tiongkok dalam bidang produksi. Pada tahun 2013 subsidi dari pemerintah Tiongkok membuat negara Tiongkok menjadi produksi baja mentah terbesar di dunia, separuh produksi pada dunia global berasal dari Tiongkok.

Dorongan yang diberikan pemerintahan Tiongkok kepada perusahaan yang bergerak pada bidang produksi baja mentah melalui subsidi terbukti berhasil

memberikan dampak positif bagi negara dan perusahaan. Pada tahun tahun 2001, subsidi yang diberikan pemerintahan Tiongkok mencapai jumlah 1.5 juta Dollar dengan 33 perusahaan yang mendapatkan subsidi tersebut. Pemerintahan Tiongkok setiap tahunnya terus menerus menaikkan angka subsidi yang diberikan hingga pada tahun 2008 nilai subsidi tersebut melonjak tinggi hingga mencapai angka 100 juta Dollar. Angka tersebut terus meningkat, tercatat pada tahun 2015 angka subsidi yang diberikan pemerintahan Tiongkok mencapai angka 1 Miliar Dollar. Angka yang kian meningkat dan mencapai jumlah yang fantastis setiap tahunnya tentu memberikan banyak pengaruh baik itu bagi pemerintahan ataupun perusahaan yang diberikan subsidi. Perlindungan yang diberikan serta pemberian subsidi ekspor dari pemerintah Tiongkok dapat meningkatkan perekonomian serta kekautan negara Tiongkok itu sendiri. Berdasarkan strategi Neo-Merkantilisme Tiongkok, tindakan yang diberikan Tiongkok kepada beberapa perusahaan tersebut akan memberikan pengaruh positif yang baik bagi negara mereka guna mencapai tujuan negara.

Akibat subsidi ekspor, perusahaan Tiongkok berhasil mendominasi pasar di Indonesia melalui 4 produk pada tahun 2021-2022 yaitu *Biaxially Oriented Polyethylene* (BOPET), *Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel* (HRC Alloy), *Lysine*, dan *Polyester Staple Fiber* (SPF). Dominasi tersebut berdampak bagi industri dalam negeri Indonesia, pada masing-masing kasus setiap industri dalam negeri mengalami kerugian seperti penjualan domestik yang menurun, menurunnya pangsa pasar, dan berkurangnya volume produksi produk. Pada produk BOPET Tiongkok mendominasi ekspor produk di Indonesia dengan total volume sebesar 36.531 metrik ton yang terus meningkat hingga 14% menjadi 47.501 metrik ton, sehingga industri dalam negeri Indonesia mengalami penurunan penjualan

domestik sebesar 11% selama periode 2016-2018. Sedangkan pada produk HRC Alloy Tiongkok mendominasi pasar dengan total volume ekspor 298.745 metrik ton yang terus meningkat sebesar 24% menjadi 461.548 metrik ton yang mengakibatkan industri dalam negeri mengalami penurunan penjualan domestik yang semula berada pada angka 100% kemudian menurun menjadi 83% pada 2016-2019. Pada produk *Lysine* dominasi impor dari Tiongkok terus meningkat sebesar 40,8% yang semula sebesar 18.707 metrik ton menjadi 37.070 metrik ton, hal tersebut menyebabkan industri dalam negeri mengalami penurunan kuantitas produk sebesar 2,9% dan penurunan pangsa pasar penjualan sebesar 9,2% pada periode 2017-2019. Meskipun volume impor menurun pada produk SPF Tiongkok tetap mendominasi dengan angka kuantitas impor yang tinggi sehingga industri dalam negeri mengalami penurunan volume penjualan domestik sebesar 11% dan penurunan produksi produk sebesar 11% pada periode 2018-2020. Dominasi Tiongkok memberikan dampak negatif terhadap industri dalam negeri di Indonesia, akan tetapi hal tersebut justru menguntungkan bagi Tiongkok karena berada pada puncak pangsa pasar masing-masing produk.

Berdasarkan data dari oec.world keseluruhan ekspor Tiongkok terhadap Indonesia mencapai nilai sebesar \$60.4 Milliar pada tahun 2021, dengan produk mesin atau alat berat senilai \$22.6 Milliar, kemudian produk bahan kimia dengan nilai sebesar \$7.78 Milliar dan produk logam dengan nilai sebesar \$7.66 Milliar. Berdasarkan data dari Tradingeconomics.com angka ekspor Tiongkok terus meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai nilai \$71.32 Milliar, dengan produk mesin senilai \$14.04 Milliar dan produk peralatan elektronik dan listrik sebesar \$13.04 Milliar.

Pada tingkat nasional Tiongkok membantu perusahaan lokal untuk mendiskriminasi perusahaan asing melalui kebijakan seperti hibah tanah, subsidi sewa, dan pinjaman dari bank sebagai cara kedua dalam menciptakan neraca perdagangan yang menguntungkan. Pemerintah Tiongkok membantu perusahaan di negara mereka untuk mengejar teknologi asing dengan memaksa perusahaan asing mentransfer teknologi mereka kepada perusahaan Tiongkok dengan cara mengontrol pembelian asing dan persyaratan usaha. Tiongkok juga memberlakukan tarif terhadap produk impor agar melindungi produk domestik dari dominasi negara lain. Selain itu, Tiongkok menerapkan tarif terhadap produk impor dengan rata-rata sebesar 9,6% dan angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan Amerika Serikat yang hanya sebesar 3,5% pada tahun 2009. Tiongkok melindungi aktivitas impor agar terlindungi dari dominasi bangsa luar yang dapat menimbulkan kerugian bagi Tiongkok ataupun industri dalam negerinya. Tiongkok tidak ingin impor lebih besar daripada ekspor karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap cadangan devisa negara dan tidak menguntungkan negara.

Akibat dari sejumlah kebijakan ekspor yang diterapkan pemerintah Tiongkok memberikan dampak pada neraca perdagangan Tiongkok. Berdasarkan data dari oec.world pada tahun 2021 angka ekspor Tiongkok ke Indonesia terus meningkat hingga banyak produk yang menyentuh angka lebih dari US\$1 Miliar hingga US\$9 Miliar dan total keseluruhan senilai US\$60.4 Miliar. Sedangkan impor yang dilakukan Tiongkok dari Indonesia tidak mencapai nilai besaran ekspor Tiongkok terhadap Indonesia. Angka tersebut terus kian meningkat hingga tahun 2022 dan menyentuh angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu US\$ 71.32 Miliar. Dengan demikian, Tiongkok berhasil menciptakan perdagangan yang

menguntungkan bagi negara. Laju ekspor Tiongkok terhadap Indonesia yang kian meningkat setiap tahunnya akan membantu Tiongkok dalam tujuan peningkatan perekonomian negara.

Selain memberikan subsidi agar angka ekspor Tiongkok terus meningkat, pemerintah Tiongkok melakukan proteksi melalui penerapan tarif terhadap produk impor yang masuk ke dalam Tiongkok. Tiongkok menerapkan kebijakan *Tariff Rate Quotas* (TRQs) dalam kebijakan impor. TRQs sendiri merupakan sistem penerapan tarif yang terdiri dari dua tingkatan, pada tingkatan pertama tarif akan diterapkan pada produk impor di dalam kuota. Pada tingkatan kedua TRQs, penerapan tarif cenderung lebih tinggi karena diterapkan pada produk impor diluar kuota. Masing-masing produk impor yang akan masuk ke dalam Tiongkok akan ditetapkan jumlah kuotanya, seperti pada tahun 2004 produk gandum ditetapkan kuota sebanyak 9,6 juta ton, 7,2 juta ton jagung, dan 5,3 juta ton beras. Masing-masing produk impor yang masuk ke Tiongkok telah ditetapkan nilai tariffnya. Penetapan kuota terhadap produk impor diatur oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok. Akibat penerapan tarif yang dilakukan Tiongkok banyak eksportir yang akan merasakan kerugian, akan tetapi hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi Tiongkok. Melalui penerapan tarif, pemerintah Tiongkok mampu melindungi komoditas lokal dari dominasi ekspor produk asing.

Melalui subsidi ekspor serta penerapan tarif Tiongkok dapat menciptakan perdagangan yang menguntungkan. Perdagangan yang menguntungkan akan membantu Tiongkok dalam meningkatkan perekonomian negara serta meningkatkan pengaruh dan kekuatan pada level internasional. Selain itu, melalui subsidi ekspor dan penerapan tarif membantu Tiongkok dalam pelaksanaan praktik

dumping di Indonesia agar menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi Tiongkok. Dumping yang dilakukan di Indonesia tahun 2021-2022.

3.3 Strategic Global Expansion

Ekspansi global merupakan salah satu cara Tiongkok untuk mengumpulkan kekayaan bagi negara. Tiongkok memiliki 3 strategi dalam melakukan ekspansi global pada dunia Internasional, yang pertama adalah *One Belt One Road Initiative* yang disempurnakan menjadi *Belt and Road Initiative* (BRI), *The Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), dan ekspansi negara dunia ketiga.

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Xi Jinping selaku presiden Tiongkok pada tahun 2013. BRI bertujuan untuk membangun infrastruktur, perdagangan, dan investasi yang menghubungkan perekonomian Eurasia (Anam & Ristiyanti, 2018). BRI dirancang sebagai strategi yang mampu membuat Tiongkok menjadi pusat dari lalu lintas perekonomian dan perdagangan dunia (Adlin, 2022). BRI memiliki 2 komponen utama yang masing-masing menghubungkan dua tujuan yang berbeda. Komponen yang pertama adalah *the Silk Road Economic Belt* yang merupakan jalur darat sebagai penghubung antara Eropa dan provinsi di barat Tiongkok yang tertinggal melewati Asia Tengah. Komponen yang kedua adalah jalur laut yang dikenal sebagai *the 21st Century Maritime Silk Road* sebagai penghubung antara Asia Tenggara hingga ke Afrika dengan daerah pesisir Tiongkok melalui pelabuhan dan jalur kereta api.

Melalui BRI Tiongkok menawarkan kerjasama multilateral guna meningkatkan hubungan ekonomi, politik, dan budaya terhadap terhadap 65 negara di seluruh benua Asia, Afrika, dan Eropa yang bekerjasama. Selain itu, BRI juga

menjadi wadah kerjasama Tiongkok bersama organisasi kawasan seperti ASEAN dan European Union (Zhou & Esteban, 2018). Zhou dan Esteban menjelaskan bahwa BRI merupakan agenda ambisius yang mendorong kemakmuran dan pembangunan serta memperdalam kerjasama multilateral. Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional melalui BRI kerjasama multilateral regional dapat ditingkatkan melalui beberapa pilar yaitu memperkuat dialog kebijakan, memperkuat fasilitas perdagangan, memperkuat kerjasama keuangan, dan memperkuat hubungan antar personal.

Adlin (2002) menyimpulkan bahwa strategi BRI merupakan salah satu cara Tiongkok dalam ekspansi yang merupakan salah satu kesempatan untuk membuat Tiongkok menjadi negara dengan pengaruh terbesar di Asia serta menjadi pemimpin kawasan tersebut. Upaya Tiongkok dalam perjanjian *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA) serta pembangunan dan kerjasama dengan negara di Asia seperti Indonesia dalam proyek kereta cepat merupakan salah satu kegigihan Tiongkok dalam merealisasikan hal tersebut. Sejalan dengan pemikiran Neo-Merkantilisme, tujuan utama Tiongkok dalam ekspansi global ini adalah menjadi pusat aktivitas perekonomian dunia sekaligus menghegemoni perekonomian dunia sehingga dapat menekankan kekuatan dan kekuasaan Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok resmi membentuk sebuah lembaga keuangan internasional baru di bawah kepemimpinan presiden Xi Jinping pada Oktober 2013. Lembaga keuangan internasional tersebut adalah *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang merupakan bank pembangunan multilateral. AIIB dibentuk atas dasar dua kepentingan yaitu untuk menyokong laju pertumbuhan ekonomi serta memberikan stabilitas pemerintahan melalui ruang batas dalam kebebasan politik

(Fanny, dkk., 2019). Terdapat tiga landasan utama strategi yang dimiliki AIIB, yang pertama adalah *Lean* yang berarti tim manajemen dan staff yang efisien dan terampil dalam menjalankan tugas. Yang kedua adalah *Clean* yang berarti bersih dan tidak memberikan toleransi terhadap tindak korupsi. Yang ketiga adalah *Green* yang berarti lembaga didirikan atas dasar menghormati lingkungan.

AIIB didirikan dengan memiliki dua tujuan utama berdasarkan *Article of Agreement* (AOA), tujuan yang pertama adalah untuk menggiatkan investasi ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kekayaan, serta konektivitas infrastruktur di benua Asia. Tujuan yang kedua adalah sebagai jembatan penghubung antara lembaga pembangunan multilateral dengan kemitraan regional untuk mempromosikan kerjasama. AIIB memiliki empat fungsi berdasarkan *Article of Agreement* (AOA);

1. Mempromosikan investasi modal swasta untuk pengembangan infrastruktur dan sektor produktif.
2. Memanfaatkan sumber daya yang sudah ada sebaik mungkin untuk membiayai pembangunan di wilayah tersebut.
3. Menanggung permodalan pihak swasta dan mendorong investasi swasta dalam proyek pembangunan ekonomi kawasan.
4. Melaksanakan aktivitas lainnya yang mampu mendorong ketiga fungsi lainnya (AIIB, 2016).

Banyak pembangunan proyek yang sudah dilaksanakan oleh AIIB, beberapa diantara adalah proyek *Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project* di Indonesia dengan jumlah pinjaman dari AIIB sebesar \$248.8 juta dengan perkiraan total biaya proyek sebesar \$316.5 juta. Kemudian ada proyek *Strategic*

Irrigation Moderniazation and Urgent Rehabilitation Project di Indonesia dengan jumlah pinjaman dari AIIB sebesar \$250 juta dan perkiraan total biaya proyek sebesar \$578 juta. Kemudian ada proyek *Andra Pradesh Urban Water Supply and Septage Management Improvement Project* di India dengan total pinjaman dari AIIB sebesar \$400 juta dan perkiraan biaya proyek sebesar \$517 juta. Melalui AIIB Tiongkok dapat memenuhi kepentingan untuk menciptakan hegemoni di kawasan Asia. Seluruh kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok satu dekade belakangan merupakan salah satu langkah Tiongkok untuk menjadi pemimpin di kawasan Asia Timur (Raharyo, 2013). Hal tersebut dapat menekankan kekuatan Tiongkok serta perekonomian Tiongkok.

Selain itu, Tiongkok melakukan invasi guna memperkuat pengaruhnya terhadap negara dunia ketiga atau negara berkembang seperti negara yang berada di wilayah Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Tiongkok menjadi mitra terbesar kedua wilayah Afrika dan banyak mengimpor minyak mentah dari wilayah ini. Tiongkok berusaha mendapatkan hak pengeboran minyak mentah pada beberapa negara di Afrika seperti Angola, Nigeria, dan Sudan. Tiongkok berinvestasi terhadap berbagai negara yang ada di benua Afrika, selain itu beberapa perusahaan asal Tiongkok juga berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan di benua Afrika. Beberapa pembangunan diantaranya adalah pembangunan jalan raya, bendungan, pembangkit listrik tenaga air, rel kereta api, membangun jalur pipa serta membangun pelabuhan. Tidak hanya pada sektor ekonomi dan pembangunan, Tiongkok juga terlibat dalam sektor militer seperti memasok kendaraan militer dan pesawat tempur ke Zimbabwe, Sudan, Ethiopia dan negara Afrika lainnya (Ayittey, 2010). Mantan presiden Afrika Selatan, Thabo

Mbeki mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Tiongkok merupakan bentuk baru dari Neo-Kolonialis karena mengambil bahan mentah dari Afrika dan menukarnya dengan manufaktur yang lebih rendah.

Sama seperti yang terjadi di Afrika, di Amerika Latin Tiongkok mengambil bahan mentah dan menukarnya dengan manufaktur. Tiongkok berhasil menjalin kemitraan dengan beberapa negara di Amerika Latin seperti Brazil, Argentina, Chili, dan Venezuela. Berasama Brazil, Tiongkok berinvestasi guna memperbaiki jalan raya dan rel kereta di Brazil serta Tiongkok berhasil menjual pesawat Embraer. Tiongkok membuat kesepakatan bersama Argentina berupa investasi sebesar US\$ 20 Miliar untuk pengembangan telekomunikasi, kereta api, dan bahan bakar hidrokarbon. Tiongkok berinvestasi terhadap tambang nikel di Chili secara besar-besaran, selain itu Tiongkok juga bekerjasama dengan Venezuela berupa hak untuk mengoperasikan 15 ladang minyak.

Pada wilayah Timur Tengah hingga ke Asia Selatan, Tiongkok berfokus membantu pembangunan. Tiongkok membangun pangkalan di pelabuhan Gwadar dan pangkalan di Vietnam. Selain itu, Tiongkok membantu Thailand dan Vietnam dalam pembangunan jalur kereta. Melalui invasi terhadap banyak negara dunia ketiga merupakan salah satu langkah pemerintah Tiongkok yang mampu mewujudkan tujuan negara mereka. Melalui invasi tersebut perekonomian negara Tiongkok dapat berkembang. Selain itu, invasi yang dilakukan Tiongkok terhadap negara dunia ketiga akan memberikan dampak terhadap pengaruh Tiongkok terhadap negara-negara tersebut. Melalui pengaruh Tiongkok tersebut pada dunia internasional akan menghinadri Tiongkok dari dominasi bangsa asing dan akan menjadi bangsa yang mendominasi negara asing lainnya.

Ekspansi global yang dilakukan Tiongkok menjadi alat dalam mencapai tujuan memperkuat perekonomian serta pengaruh dan kekuasaan negara pada level internasional. Melalui tiga strategi BRI, AIIB, dan invasi negara dunia ketiga yang diterapkan Tiongkok, hal tersebut mampu membuat Tiongkok menjangkau mitra kerja dengan mudah. Ketiga strategi tersebut mempermudah jalan akses bagi Tiongkok untuk melakukan tindak kecurangan pada bidang perdagangan internasional, seperti praktik dumping yang dilakukan Tiongkok pada Indonesia tahun 2021-2022. Praktik dumping melalui ekspansi global merupakan salah satu upaya Tiongkok guna memperkuat negara dan perekonomian.

**Tabel 1. Analisis Neo-Merkantilisme dalam
Praktik Dumping Tiongkok di Indonesia Tahun 2021-2022**

No	Variabel	Aplikasi
1.	<i>Promoting Nationalism and Patriotism</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Promosi nasionalisme dan patriotisme digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan bebas dominasi bangsa asing. - Produk baja merupakan industri terbesar kebanggaan Tiongkok. - Laju produksi dan ekspor produk baja Tiongkok sangat besar sehingga dijadikan sebagai alat promosi nasionalisme dan patriotisme Tiongkok. - Pada tahun 2022 Tiongkok terbukti melakukan dumping produk <i>Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)</i> yang merupakan baja ringan.
2.	<i>Technologicalism</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemajuan teknologi memberikan kemudahan Tiongkok untuk memperkuat perekonomian negara. - Kemajuan teknologi mempermudah Tiongkok menjangkau mitra internasional untuk bekerja sama. - Kemajuan teknologi membantu Tiongkok dalam perdagangan internasional seperti kegiatan ekspor dan impor. - Melalui kemajuan teknologi Tiongkok melakukan ekspor dan dumping di Indonesia tahun 2021-2022.
3.	<i>Population for a Strong Nation</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Populasi merupakan peran penting sebagai tenaga kerja, semakin banyak tenaga kerja semakin membantu negara mendapatkan kekayaan. - Populasi Tiongkok yang besar menyebabkan tingkat produksi dan ekspor yang besar. - Melalui populasi yang banyak, Tiongkok mampu mengekspor dalam skala besar dan melakukan dumping pada tahun 2021-2022.
4.	<i>Bullionism and Hard Currencies Accumulation</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui cadangan devisa dan nilai tukar yang tinggi mampu membantu negara menguatkan perekonomian. - Tiongkok menyimpan emas sebagai cadangan devisa. - Cadangan devisa dapat meningkat melalui angka ekspor yang tinggi dan impor yang rendah. - Agar menciptakan angka ekspor yang besar Tiongkok melakukan dumping di Indonesia tahun 2021-2022.
5.	<i>Maintaining a Favorable of Trade</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam menciptakan perdagangan yang menguntungkan, Tiongkok meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. - Agar mendorong laju ekspor Tiongkok memberikan subsidi ekspor. - Angka ekspor Tiongkok terus meningkat dan Tiongkok melakukan dumping di Indonesia tahun 2021-2022 dan 4 kasus dikenakan BMAD.
6.	<i>Strategic Global Expansion</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ekspansi global merupakan cara Tiongkok untuk mengumpulkan kekayaan negara. - Tiongkok melakukan ekspansi global melalui pembangunan BRI, pembentukan AIIB, dan ekspansi negara dunia ketiga. - Ketiga strategi tersebut mempermudah Tiongkok dalam perdagangan internasional seperti pada sektor ekspor dan impor. - Melalui kemudahan berkat ekspansi global, Tiongkok melakukan dumping di Indonesia tahun 2021-2022.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Praktik dumping merupakan tindakan ilegal pada dunia perdagangan internasional. *World Trade Organization* (WTO) selaku organisasi perdagangan internasional melarang tindakan praktik dumping karena memberikan sejumlah kerugian terhadap negara yang terdampak dan hal tersebut sudah diatur dalam *Anti-Dumping Agreement of Article VI of GATT 1994*. WTO sudah menerima banyak laporan kasus praktik dumping, tercatat pada periode 1995-2008 terdapat 3.427 kasus. Indonesia membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebagai respon untuk mencegah terjadinya praktik dumping di Indonesia dan menciptakan perdagangan internasional yang adil. Berdasarkan data hasil penyelidikan KADI Tiongkok terlibat di dalam 25 kasus dari total 32 kasus pada tahun 2016-2022. Tiongkok juga tercatat dengan 4 kasus yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dari total 10 kasus terlapor pada tahun 2021-2022.

Tiongkok melakukan praktik dumping di Indonesia guna memperkuat negara serta kekuasaan dan pengaruhnya pada dunia internasional khususnya pada sektor perekonomian. Berdasarkan enam variable kerangka pemikiran Neo-Merkantilisme yang dicetuskan Yu pada tahun 2019, dumping yang dilakukan Tiongkok melalui *promoting nationalism and patriotism, bullionism and hard currency accumulation, maintaining a favorable balance of trade, technologicalism, strategic global expansionn* dapat menciptakan perekonomian negara yang kuat dan menciptakan masyarakat makmur.

Melalui *promoting nationalism and patriotism*, rasa nasionalisme dan patriotisme Tiongkok berbuah peningkatan ekspor yang dapat meningkatkan perekonomian negara. Selain itu Tiongkok juga bebas dari dominasi dan memberikan pengaruhnya terhadap bangsa asing yang membuat negara Tiongkok semakin kuat pada kancah internasional. Beberapa narasi dan gagasan yang mencerminkan identitas Tiongkok mampu membantu memperkuat kekuasaan serta pengaruh negara pada lingkup internasional. Dumping yang dilakukan Tiongkok di Indonesia tahun 2021-2022 dilakukan guna memperkuat pengaruhnya terhadap Indonesia. Tiongkok melakukan dumping melalui komoditas yang mencerminkan identitas negara seperti baja yang merupakan komoditas utama Tiongkok.

Pada *bullionism and hard currency* berhasil memberikan Tiongkok cadangan devisa yang besar melalui menyimpan emas dan juga ekspor yang membuat perekonomian negara semakin kuat. Melalui hal tersebut mata uang Tiongkok Renminbi juga berhasil memenangkan kenaikan ke dalam kelompok mata uang elit *Special Drawing Rights (SDR)* dari *International Monetary Fund (IMF)* pada tahun 2016. Hal tersebut berdampak pada perdagangan global dan pasar mata uang tidak lagi tertuju kepada Dollar AS, dominasi Dollar AS sekarang mendapat saingan dari Renminbi. Sebagai keranjang mata uang SDR, hal berdampak pada peningkatan perekonomian Tiongkok karena banyak investor asing yang tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang berada di Tiongkok. Dumping yang dilakukan Tiongkok di Indonesia tahun 2021-2022 mampu meningkatkan angka ekspor Tiongkok. Hal tersebut dapat meningkatkan cadangan devisa negara Tiongkok serta memperkuat perekonomian negara serta nilai tukar Renminbi.

Maintaining a favorable balance of trade juga berhasil memberikan Tiongkok peningkatan perekonomian negara. Melalui subsidi ekspor yang diberikan pemerintah Tiongkok, angka ekspor Tiongkok berhasil naik secara drastis dan menyentuh total nilai sebesar \$60.4 Milliar pada tahun 2021 dan \$71.32 Milliar pada tahun 2022. Selain itu penerapan TRQs yang diberlakukan pemerintah Tiongkok berhasil melindungi komoditas di dalam negara. Berkat hal tersebut Tiongkok juga berhasil melindungi aktivitas impor dari dominasi bangsa luar. Pemerintah Tiongkok berhasil meredam angka impor agar tidak lebih tinggi dari angka ekspor yang dilakukan Tiongkok, hal tersebut membantu negara dalam meningkatkan cadangan devisa sehingga terciptanya perdagangan yang menguntungkan. Melalui subsidi ekspor dan penerapan TRQs, Tiongkok akan lebih mudah dalam meningkatkan angka ekspor. Angka ekspor tersebut akan semakin meningkat dan mudah dilakukan melalui dumping di Indonesia tahun 2021-2022. Dengan meningkatnya angka ekspor melalui dumping, hal tersebut akan memberikan perdagangan yang menguntungkan bagi Tiongkok serta peningkatan perekonomian negara.

Technologicalism membantu mempermudah urusan pemerintah Tiongkok dalam dunia perdagangan internasional yang mampu menjangkau mitra dengan lebih mudah. Kemajuan teknologi juga mendorong pembangunan negara dalam mencapai tujuan yang ingin di raih negara. Kemajuan teknologi dapat dijadikan sebagai alat dalam hubungan kerjasama antar negara seperti proyek kereta cepat Tiongkok dan Indonesia. Dengan kemudahan tersebut, perekonomian negara Tiongkok semakin meningkat serta pengaruh Tiongkok terhadap dunia internasional semakin kuat. Kemajuan teknologi meningkatkan ekspor Tiongkok

dengan berbagai negara di lingkup internasional. Hal tersebut mempermudah Tiongkok dalam melakukan dumping di Indonesia guna menciptakan perekonomian negara yang makmur.

Strategic global expansion melalui BRI berperan penting sebagai jembatan yang menghubungkan antara Tiongkok dengan negara yang bekerjasama pada BRI. Selain itu, BRI berperan sebagai jalur yang dapat mempermudah jalannya perdagangan internasional Tiongkok. AIIB berperan dalam meningkatkan hubungan antara Tiongkok dengan mitra kerja melalui dukungan finansial, dan ekspansi negara dunia ketiga juga membuat pengaruh Tiongkok terhadap dunia internasional semakin kuat. Melalui ketiga strategi ekspansi tersebut akan mempermudah jangkauan Tiongkok dalam perdagangan internasional. Dumping yang dilakukan Tiongkok di Indonesia dilakukan guna menyebarluaskan pengaruh Tiongkok agar meningkatkan kekuatan Tiongkok pada dunia internasional.

population policy for strong nation juga membantu Tiongkok meningkatkan produktivitas industri semakin meningkat. Populasi Tiongkok yang tinggi mempermudah aktivitas produksi dan ekspor yang membuat perekonomian negara Tiongkok semakin kuat. Dumping yang dilakukan Tiongkok di Indonesia terjadi karena laju ekspor Tiongkok yang tinggi berkat jumlah tenaga kerja yang besar. Hal tersebut akan membantu Tiongkok dalam mewujudkan tujuannya yaitu menciptakan perekonomian negara yang makmur.

Keenam variabel teori Neo-Merkantilisme yang dicetuskan Yu saling mendorong satu sama lain dalam praktik dumping Tiongkok di Indonesia tahun 2021-2022 dengan tujuan mencapai perkembangan perekonomian, kekuatan, dan pengaruh pada level internasional. Terdapat tiga variabel yang bergerak pada

strategi domestik dan tiga lainnya pada strategi luar negeri yang mendorong praktik dumping terjadi di Indonesia tahun 2021-2022 untuk mencapai perkembangan perekonomian, kekuatan, dan kekuasaan pada tingkat internasional.

Akibatnya Indonesia mengalami banyak kerugian pada sektor industri seperti penurunan produksi, harga pokok penjualan, volume penjualan, dan minat daya saing negara asing lainnya. Pada kasus dumping produk BOPET Industri dalam negeri Indonesia mengalami penurunan penjualan sebesar 3%. Pada kasus dumping HRC Alloy impor dari negara lain menurun sebesar 22% yang menimbulkan persaingan tidak sehat dan dampak penurunan penjualan domestik industri dalam negeri pada tahun 2016-2018. Pada kasus dumping Lysine industri dalam negeri Indonesia mengalami penurunan pada harga penjualan domestik sebesar 8%. Pada kasus dumping SPF Tiongkok menyebabkan industri dalam negeri Indonesia mengalami kerugian pada volume dan nilai penjualan domestik yang menurun sebesar 11% dan 29%, harga domestik sebesar 21%, dan harga pokok penjualan sebesar 17% pada periode 2018-2020.

4.2 Rekomendasi

Studi kasus dumping yang dibahas peneliti hanya berpaku pada periode 2021-2022, masih banyak periode tahun yang tidak dapat dibahas peneliti pada penelitian ini dan studi kasus dapat bertambah terus seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, disarankan untuk peneliti selanjutnya membahas mengenai studi kasus dumping berdasarkan periode waktu yang lebih relevan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Studi kasus dumping yang terjadi menjadi bukti bagi pemerintah Indonesia bahwa proteksi Indonesia terhadap tindakan ilegal seperti dumping masih sangat

rendah dan sangat rentan untuk terjadi. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah preventif untuk mencegah terjadinya kasus dumping di Indonesia agar tidak mengalami kerugian secara terus menerus. Pemerintah Indonesia terlalu fokus terhadap mengatasi tindakan dumping yang telah terjadi dan hendaknya meningkatkan usaha preventif mengenai praktik dumping.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, K., & Ozturk, I. (2018). What new technology means for the energy demand in China? A sustainable development perspective. *Environmental Science and Pollution Research*, 25(29), 29766–29771.
<https://doi.org/10.1007/s11356-018-2957-3>
- Alaydrus, H. (2023, January 8). *RI Kalah Telak, Cadangan Devisa China Tembus Rp488.906 T*. CNBC Indonesia. Retrieved March 25, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230108132226-4-403721/ri-kalah-telak-cadangan-devisa-china-tembus-rp488906-t>
- Anam, S., & Ristiyani, R. (2018). *Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping*. <http://www.iris-anam.com>
- Anam, S., & Solikin, A. (2020). DAMPAK KEBIJAKAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP PROTEKSI DAN DAYA SAING PRODUK BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG. *Indonesian Treasury Review*, 5(3), 235–253.
- Anggraeni, N. (2015). DUMPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM. *Mazahib*, XIV(2), 160–168.
- Anggraeni, N. (2017). Negara Berkembang, Perlindungan Produk Dalam Negeri dalam Konteks Hukum Perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO). *Al-Ahkam*, 13(1), 62. <https://doi.org/10.37035/ajh.v13i1.1749>
- Ari Cahyani, C., Ekonomi Pembangunan, J., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2014). *Economics Development Analysis Journal ANALISIS DAYA SAING INDUSTRI BESI BAJA DALAM RANGKA MENGHADAPI ACFTA Abstrak*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Atkinson, R. D. (2012). *Enough is Enough: Confronting Chinese Innovation Mercantilism*.
- Ayittey, G. (2010). Chopsticks mercantilism: China's involvement in Africa. *Probe International*.
- Barnard, J. (2023). *One-child policy - Consequences of China's one-child policy*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/one-child-policy/Consequences-of-Chinas-one-child-policy>
- Brandt, L., & Morrow, P. M. (2017). Tariffs and the organization of trade in China. *Journal of International Economics*, 104, 85–103.
<https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2016.10.010>
- Cahyani, C. A. (2014). ANALISIS DAYA SAING INDUSTRI BESI BAJA DALAM RANGKA MENGHADAPI ACFTA. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2).
- Capling, A. (2008). Australia's trade policy dilemmas. *Australian Journal of International Affairs*, 62(2), 229–244.
<https://doi.org/10.1080/10357710802060576>
- Chen, B., Villoria, N. B., & Xia, T. (2018). *Import Protections in China's Grain Markets: An Empirical Assessment*.
- Chen, Z. (2005). Nationalism, internationalism and Chinese foreign policy. *Journal of Contemporary China*, 14(42), 35–53.
<https://doi.org/10.1080/1067056042000300772>
- Collins, N., & O'Brien, D. (2022). Neo-mercantilism in action: China and small states. *International Politics*. <https://doi.org/10.1057/s41311-022-00419-3>

- Darmawan, R., & Irawati. (2021). Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.177>
- Defever, F., & Riano, A. (2012). China's Pure Exporter Subsidies. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2204978>
- Defever, F., & Riaño, A. (2017). Subsidies with export share requirements in China. *Journal of Development Economics*, 126, 33–51. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2016.12.003>
- Deni Saputra, F. (2015). Analisis impor Indonesia dari Cina. In *Industri dan Moneter* (Vol. 3, Issue 1).
- Eka Prasetya, A., Nurcahyo, A., Keuangan, P., Stan, N., Bintaro, J., Sektor, U., & Selatan, T. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN ANTIDUMPING DI INDONESIA (STUDI KASUS PRODUK BOPET). *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1), 2022.
- Epstein, N. (2018). *Exchange Rate Policy and Regimes Bank Indonesia International Workshop and Seminar Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges and Policies*.
- Fadly, M., & Setianingsih, D. (2020). Pengaruh Industri, Pangsa Pasar dan Web Traffic terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN*, 9(3), 305–319.
- Fathana, H. (2018). Palm Oil Politics in Malaysia and Indonesia: Competition or Collaboration? *JATI - JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES*, 23(2), 47–64. <https://doi.org/10.22452/jati.vol23no2.3>
- Feran, R., Kermite, J., & Setlight, M. (2022). PRAKTIK DUMPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA. *Lex Privatum*, 10(2), 1–12. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/14/150909569/>
- Gleason, S. (2016, September 1). *China's Monetary Ascension Is Paved with Gold*. Money Metals Exchange. Retrieved March 24, 2023, from <https://www.moneymetals.com/news/2016/09/01/china-monetary-gold-000918>
- Grange Resources Limited. (2019). *2019 Annual Report* [Annual Report].
- Gries, P. H., Zhang, Q., Crowson, H. M., & Cai, H. (2011). Patriotism, Nationalism and China's US Policy: Structures and consequences of Chinese National Identity. *China Quarterly*, 205, 1–17. <https://doi.org/10.1017/S0305741010001360>
- Hartono, M. (2008). NASIONALISME ASIA TIMUR: SUATU PERBANDINGAN JEPANG, CINA, DAN KOREA. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12.
- Hodijah, S., Patricia Angelina, G., Ekonomi dan Bisnis, F., & Jambi, U. (2021). ANALISIS PENGARUH EKSPOR DAN IMPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 10(01).
- Hong, X., Jiang, Y., Luo, L., & Li, P. H. (2022). The Impact of Two-Child Policy on Early Education and Development in China. In *Early Education and Development* (Vol. 33, Issue 3, pp. 369–374). Routledge. <https://doi.org/10.1080/10409289.2022.2031439>

- Honglin ZHANG, K., & Song, S. (2000). Promoting exports The role of inward FDI in China. *China Economic Review*, 11, 385–396.
- Hu, A. G. Z., & Jefferson, G. H. (2008). *Science and Technology in China*.
- Huang, Z., Yang, Z., & Meng, T. (2023). National Identity of Locality: The State, Patriotism, and Nationalism in Cyber China. *Journal of Chinese Political Science*, 28(1), 51–83. <https://doi.org/10.1007/s11366-022-09820-4>
- Irfan Sabir, R., & Moazzam Sabir, R. (2010). Managing technological innovation: China’s strategy and challenges. *Journal of Technology Management in China*, 5(3), 213–226. <https://doi.org/10.1108/17468771011086238>
- Ito, H., & McCauley, R. N. (2020). Currency composition of foreign exchange reserves. *Journal of International Money and Finance*, 102. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2019.102104>
- Jamilah, Sinaga, B., & Hakim, D. (2016). DAMPAK PERLAMBATAN EKONOMI CHINA DAN DEVALUASI YUAN TERHADAP KINERJA PERDAGANGAN PERTANIAN INDONESIA INDONESIA Jamilah. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 20(3), 325–345.
- Kallio, J. (2015). Dreaming of the Great Rejuvenation of the Chinese Nation. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 8(4), 521–532. <https://doi.org/10.1007/s40647-015-0097-4>
- Komite Anti Dumping Indonesia. (2020). *LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (BOPET) YANG BERASAL DARI INDIA, THAILAND, DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK*.
- Komite Anti Dumping Indonesia. (2020). *LAPORAN DATA UTAMA PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (BOPET) YANG BERASAL DARI INDIA, THAILAND, DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK*.
- Komite Anti Dumping Indonesia. (2021). *LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90 YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)*.
- Komite Anti Dumping Indonesia. (2021). *LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR LYSINE YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK*.
- Komite Anti Dumping Indonesia. (2021). *LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90 YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)*.
- Komite Anti Dumping Indonesia. (2021). *LAPORAN DATA UTAMA PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR LYSINE YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK*.
- Komite Anti Dumping Indonesia. (2022). *LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW TERHADAP PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER (PSF) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN*.

- Komite Anti Dumping Indonesia. (2022). *LAPORAN DATA UTAMA PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW TERHADAP PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER (PSF) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN*.
- Kawai, M., & Liu, L.-G. (2015). *ADB Working Paper Series Trilemma Challenges for the People's Republic of China* Asian Development Bank. <http://www.adbi.org/working-paper/2015/02/10/6533.trilemma.challenges.prc/>
- Laskai, L. (2016). *The Thirteenth Five-Year Plan*. The China Story. <https://www.thechinastory.org/yearbooks/yearbook-2016/chapter-1-whats-the-plan/the-thirteenth-five-year-plan/>
- Li, X. (2015). Interpreting and Understanding “The Chinese Dream” in a Holistic Nexus. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 8(4), 505–520. <https://doi.org/10.1007/s40647-015-0098-3>
- Lili, S. (2011). China's steel industry suffers a tough situation. *CHINA Update*, www.steeltimesint.com.
- Ma, Y. (2023, March 2). *China: total imports and exports in goods 2022*. Statista. Retrieved March 26, 2023, from <https://www.statista.com/statistics/257252/import-of-goods-to-china/>
- Macrotrends. (2023). *China Population 1950-2023 | MacroTrends*. Macrotrends. <https://www.macrotrends.net/countries/CHN/china/population>
- Matano Asia, S. (2021). *THE IMPACT OF CHINA'S INDUSTRIAL SUBSIDIES ON COMPANIES AND THE RESPONSE OF JAPAN, THE UNITED STATES, AND THE EUROPEAN UNION*.
- McCauley, R. N., & Shu, C. (2019). Recent renminbi policy and currency co-movements. *Journal of International Money and Finance*, 95, 444–456. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2018.03.006>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand* [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /PMK.010/2021].
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Lisin, Ester dan Garamnya Untuk Pakan Ternak (Feed Grade) Dari Republik Rakyat Tiongkok* [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.010/2022].
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Pengenaan Bea Masuk AntiDumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Coil of other Alloy (HRC ALLOY) dari Republik Rakyat Tiongkok* [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 /PMK.010/2022].
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Pengenaan Bea Masuk AntiDumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber (PSF) dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan* [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.010/2022].
- Mildyanti, R., & Triani Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl Hamka Air Tawar Padang, M. (2019). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CADANGAN*

- DEVISI (STUDI KASUS DI INDONESIA DAN CHINA). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 165–176.
- Modongal, S. (2016). Development of nationalism in China. *Cogent Social Sciences*, 2(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2016.1235749>
- Muafi. (2019). KEPENTINGAN CINA MEMASUKKAN YUAN KE SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR). *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(1), 245–260.
- Muttahara, I., & Gunarta, I. (2016). Restrukturisasi Perusahaan dengan Menggunakan Metode Optimasi (Studi Kasus : PT X). *JURNAL SAINS DAN SENI ITS*, 4(1), 1–4.
- Nawiyah, & Puar, Z. M. (2020). PENGARUH INVESTASI CHINA KE INDONESIA, EKSPOR INDONESIA-CHINA, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL. *Jl. Timbul No. 34 Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan, 12630*, 151–159. <https://tirto.id/coNd>
- Nazhira Adlin, C. (2022). *PANDANGAN MERKANTILISME TERKAIT KEBIJAKAN BELT AND ROAD INITIATIVE CHINA*. <https://www.researchgate.net/publication/365348160>
- Ngatikoh, S., & Faqih, D. A. (2020). KEBIJAKAN EKSPOR IMPOR : STRATEGI MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(2), 167–190. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Nufus, H. (2014). IMPIAN TIONGKOK: NASIONALISME TIONGKOK MELINTAS BATAS DALAM PEMBANGUNAN TIONGKOK CHINA DREAM: CHINESE NATIONALISM ACROSS BORDERS IN CHINA DEVELOPMENT. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 43–54. <http://cpc.people.com.cn/n/2012/1130/>
- Nugroho, A., & Ariyani, A. (2018). PERAN POLITICAL WILL DAN ORGANIZATIONAL CULTURE PERUSAHAAN BESI DAN BAJA. *Jurnal Studi Bisnis Dan Administrasi*, 1(2), 1–13.
- Nusarastrinya, Y. H. (2015). SEJARAH NASIONALISME DUNIA DAN INDONESIA. *Pax Humana*.
- OECD. (2019, May 7). *China (CHN) and Indonesia (IDN) Trade*. <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/idn?comparativeAdvantageAxisScaleSelector=linear&depthBalanceProductSelector=SectionDepth&depthSelector=HS6Depth&measureBilateralTradeSelector=vizValueOption1>
- Peter Thomas, I. der H. (t.t.). *Chinese sectoral industrial policy shaping international trade and investment patterns—Evidence from the iron and steel industry*.
- Prasetya, A. E., & Nurcahyo, M. A. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN ANTIDUMPING DI INDONESIA (STUDI KASUS PRODUK BOPET). *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 6(1), 205–232. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1575>
- PRC State Council. (2019). *Circular of the State Council on Issuing the National 13 th Five-Year Plan for the Development of Strategic Emerging Industries*. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/19/content_5150090.htm
- Priandaru, D. L. (2023, March 3). *China Kalahkan AS dan Barat, Jadi Negara Tercanggih dalam Teknologi Penting Halaman all*. Kompas.com.

- <https://www.kompas.com/global/read/2023/03/03/130100870/china-kalahkan-as-dan-barat-jadi-negara-tercanggih-dalam-teknologi?page=all>
- PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. (2022). *Dewan Baja ASEAN (AISC) Mendorong Penguatan Industri Baja Regional*. PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. <https://www.krakatausteel.com/viewnews/2486>
- Puar, Z. M. (2020). *PENGARUH INVESTASI CHINA KE INDONESIA, EKSPOR INDONESIA- CHINA, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL*.
- Qomara, G. (2015). Grienda Qomara Kebangkitan Tiongkok dan Relevansinya terhadap Indonesia. In *Jurnal Hubungan Internasional* □ Tahun VIII (Issue 2).
- Ravenhill, J. (2008). Fighting irrelevance: An economic community ‘with ASEAN characteristics.’ *The Pacific Review*, 21(4), 469–488. <https://doi.org/10.1080/09512740802294697>
- Rezky Auliady, M., & Farlian, T. (2018). ANALISIS EKSPOR IMPOR ANTARA INDONESIA-CHINA. In *JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah* (Vol. 3, Issue 4).
- Rezma Fanny, C., Nur Arifianti, D., & Daffa Augusta, E. (2019). *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Sebagai Bentuk Hegemoni Baru Tiongkok* (Vol. 2, Issue 1).
- Rubini, L., & Ruta, M. (2012). *China’s Pure Exporter Subsidies*.
- Sabaruddin, S. (2015). Dampak Perdagangan Internasional Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Aplikasi Structural Path Analysis. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 17(4), 434–456.
- Sanjaya, D. R., Hartarto, M., Hadi, S., & Supriyadi, S. (2022). Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 96–101.
- Shan, Y. (2018). *The Impact of Technological Innovation on China’s Economic Level*.
- Saputra, F. D. (2017). Analisis impor Indonesia dari Cina. *e-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 3(1), 16–21. <https://doi.org/10.22437/pim.v3i1.3989>
- Siregar, N. O. (2022). Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia. *JUSTISI*, 8(1), 67–81. <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1563>
- Slotta, D. (2023, January 16). *Currency exchange rate Chinese yuan to U.S. dollar by month December 2022*. Statista. Retrieved March 27, 2023, from <https://www.statista.com/statistics/456227/monthly-exchange-rate-chinese-yuan-to-us-dollar/>
- Sulasmiyati, S. (2008). Sistem Nilai Tukar Mata Uang dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(1), 243-251.
- Suseno, I. S. (2004). *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK) BANK INDONESIA*.
- Thomas, P. (2011). *Chinese sectoral industrial policy shaping international trade and investment patterns - Evidence from the iron and steel industry*. <http://hdl.handle.net/10419/45004>

- Wang, J. (2017). Representing Chinese nationalism/patriotism through President Xi Jinping's "Chinese Dream" Discourse. *Journal of Language and Politics*, 16(6), 830–848. <https://doi.org/10.1075/jlp.16028.wan>
- Wang, Z. (2014). The Chinese Dream: Concept and Context. *Journal of Chinese Political Science*, 19(1), 1–13. <https://doi.org/10.1007/s11366-013-9272-0>
- Wei, L. (2016, February 7). *China's Forex Reserves Plunge to More-Than-Three-Year Low*. The Wall Street Journal. <https://www.wsj.com/articles/chinas-forex-reserves-plunge-to-more-than-three-year-low-1454816583>
- Widayanto, S. (2016). WTO MELINDUNGI KEPENTINGAN DOMESTIK NEGARA ANGGOTANYA SECARA OPTIMAL. *Jurnal Tinjauan Perdagangan Indonesia, TMDI, Kementerian Perdagangan RI*, 35, 2–16. http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/images/Bulletin/Buletin43.pdf
- World Trade Organization. (1994). *AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI*.
- Wu, W. (2017, February 5). *China stocked up on Swiss gold as turbulent year ended*. South China Morning Post. Retrieved March 24, 2023, from <https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2068101/china-stocked-swiss-gold-turbulent-year-came-close>
- Yang, J., Liu, H., Gao, S., & Li, Y. (2012). Technological innovation of firms in China: Past, present, and future. In *Asia Pacific Journal of Management* (Vol. 29, Issue 3, pp. 819–840). <https://doi.org/10.1007/s10490-010-9243-3>
- Yosaphat, D., Nusarastraya, H., & Si, M. (2015). SEJARAH NASIONALISME DUNIA DAN INDONESIA. *Pax Humana*.
- Yu, F. L. T. (2017). NeoMercantilist policy and China's rise as a global power. In *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations* (Vol. 3, Issue 3, pp. 1043–1073). Institute of China and Asia-Pacific Studies - National Sun Yat-sen University. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6462-4_8
- Zeng, S. (2012). Study on Chinese foreign exchange reserves. In *Journal of Applied Finance & Banking* (Vol. 2, Issue 1). online) International Scientific Press.
- Zhang, R., Pian, H., Santosh, M., & Zhang, S. (2015). The history and economics of gold mining in China. *Ore Geology Reviews*, 65(P3), 718–727. <https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2014.03.004>
- Zhimin, C. (2005). Nationalism, Internationalism and Chinese Foreign Policy. *Journal of Contemporary China*, 14(42), 35–53. <https://doi.org/10.1080/1067056042000300772>
- Zhou, W., & Esteban, M. (2018). Beyond Balancing: China's approach towards the Belt and Road Initiative. *Journal of Contemporary China*, 27(112), 487–501. <https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1433476>